



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2025**





WALIKOTA PRABUMULIH

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 34 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan adanya pergeseran kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 543);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 34);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PRABUMULIH TAHUN 2025**

Pasal I

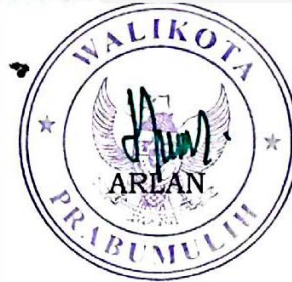
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2025
WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 NOMOR 38

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-1
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan	I-3
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-4
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025	II-1
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2025....	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan II Tahun 2025.....	II-3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.....	III-1
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-4
3.1.3 PDRB Per Kapita.....	III-5
3.1.4 Ketenagakerjaan	III-6
3.1.5 Kemiskinan.....	III-7
3.1.6 Ketimpangan Pendapatan	III-8
3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	III-8
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-10
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kota Prabumulih	IV-1
4.3 Tema Pembangunan.....	IV-2
4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.5 Sasaran Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025.....	IV-6
4.5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	IV-6
4.5.2 Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.....	IV-7
4.5.3 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	IV-7
4.5.4 M Realisasi Penanaman Modal	IV-7
4.5.5 Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	IV-8
4.5.6 Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial	IV-8
4.5.7 Meningkatnya Kesenjangan Gender.....	IV-8
4.5.8 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	IV-9
4.5.9 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IV-9
4.5.10 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IV-9
4.5.11 Menurunnya Kawasan Kumuh	IV-10

4.5.12 Meningkatnya Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum	IV-10
4.5.13 Meningkatnya Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi.....	IV-10
4.5.14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IV-10
4.5.15 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	IV-11
4.5.16 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	IV-11
4.5.17 Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	IV-11
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	II-1
Tabel 2. 2	EVALUASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME) PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2025 S/D BULAN APRIL	II-3
Tabel 2. 3	REKAPITULASI EVALUASI KERJA KINERJA OPD KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 S/D BULAN APRIL	II-91
Tabel 3. 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	III-2
Tabel 3. 2	Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Prabumulih (%)	III-3
Tabel 3. 3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2022-2025.	III-9
Tabel 3. 4	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Prabumulih Tahun 2022-2025.....	III-10
Tabel 3. 5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022-2025.....	III-12
Tabel 4. 1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
Tabel 4. 2	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Prabumulih	IV-2
Tabel 4. 3	Sandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah Kota Prabumulih.....	IV-4
Tabel 4. 4	Sandingan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Prioritas Daerah.....	IV-5
Tabel 4. 5	Sandingan Prioritas dan Sasaran Kota Prabumulih	IV-5
Tabel 4. 6	Sasaran dan Targetnya Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025.....	IV-6
Tabel 4. 7	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri.....	IV-7
Tabel 4. 8	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	IV-7
Tabel 4. 9	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	IV-7
Tabel 4. 10	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.....	IV-7
Tabel 4. 11	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	IV-8
Tabel 4. 12	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial.....	IV-8
Tabel 4. 13	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender	IV-8
Tabel 4. 14	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.....	IV-9
Tabel 4. 15	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IV-9

Tabel 4. 16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat IV-9

Tabel 4. 17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Kawasan Kumuh IV-10

Tabel 4. 18 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya RT Yang Memiliki Akses Air Minum..... IV-10

Tabel 4. 19 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya RT Yang Memiliki Akses Sanitasi..... IV-10

Tabel 4. 20 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IV-11

Tabel 4. 21 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik IV-11

Tabel 4. 22 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan IV-11

Tabel 4. 23 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan IV-12

Tabel 5. 1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Prabumulih Tahun 2025 V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-2
Gambar 3.2	Tiga Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-3
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-4
Gambar 3. 4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-4
Gambar 3. 5	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2024.....	III-5
Gambar 3. 6	PDRB ADHB Per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 (juta Rp)	III-6
Gambar 3. 7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-7
Gambar 3. 8	Tingkat Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024.....	III-7
Gambar 3. 9	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-8
Gambar 3. 10	Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih Tahun 2020-2024	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- o. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 28);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Prabumulih dengan Walikota Prabumulih yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Perubahan 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Prabumulih sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50-4,70	5,01 <i>Angka thn 2024</i>	106%
2	Indeks Gini	Indeks	0,36	0,35 <i>Angka Thn 2024</i>	97%
3	PDRB Perkapita	Juta	44,74	51,81 <i>Angka Thn 2024</i>	115%
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,39	78,86 <i>Angka Thn 2024</i>	103%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,95	4,94 <i>Angka Thn 2024</i>	101%
6	Angka Kemiskinan	%	10,76	10,13 <i>Angka Thn 2024</i>	106%
7	Indeks Infrastruktur	Indeks	97,51	74,45 <i>Angka Thn 2024</i>	76%
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (51-55)	77,40	140%
9	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	4,95	5,26 <i>Angka Thn 2024</i>	104,85%
10	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,14	7,75 <i>Angka Thn 2024</i>	108,54%
11	Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, dan Perikanan	%	3,98	3,85 <i>Angka Thn 2024</i>	103,22%
12	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	5	2,43 <i>Angka Thn 2024</i>	48,60%
13	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	%	4,9	4,9 <i>Angka Thn 2024</i>	100%
14	Persentase Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial	%	75,9	43,15 <i>Angka Thn 2024</i>	56,85%
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.87	94,47 <i>Angka Thn 2024</i>	102,52%
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63	68,60 <i>Angka Thn 2024</i>	98,52%
17	Indeks Pendidikan	Indeks	0,72	0,77 <i>Angka Thn 2024</i>	106,94%
18	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,75	74,87 <i>Angka Thn 2024</i>	104,35%
19	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	%	37,36	26	69,59%

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
				Angka Thn 2024	
20	Persentase RT yang terlayani air minum	%	96,57	95,69 Angka Thn 2024	99,09%
21	Persentase RT yang memiliki akses sanitasi	%	94,76	97,22 Angka Thn 2024	102,60%
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,47	62,79 Angka Thn 2024	90,38%
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (62,51-81,25)	89,53 Angka Thn 2024	110%
24	Nilai SAKIP Kota	Nilai	B (70-75)	60,86 Angka Thn 2024	86,94%
25	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
26	Level Maturitas	Level	3,2	3,2 Angka Thn 2024	100%
27	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	40-45	66,37 Angka Thn 2024	147%
28	Indeks SPBE	Indeks	3,0-3,1	3,37 Angka Thn 2024	109%

Sumber data : Data Olahan

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan II Bulan April Tahun 2025

Tabel 2. 2 EVALUASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME) PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2025 S/D BULAN APRIL

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								16,84	
1.1.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase transparansi dan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintah				100,81		9,47	35,71	
1.1.1.1.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat				25		12,5	31,25	
1.1.1.1.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	4	dokumen	2	50	1	50	25	, , -Belum menginput realisasi fisik dan keuangan dikarenakan belum
1.1.1.1.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1	50	0	0	0	
1.1.1.1.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	dokumen	0	0	0		0	
1.1.1.1.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	0	0	1		100	
1.1.1.1.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan				266,67		23,81	166,67	
1.1.1.1.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	983	orang	6881	700	4915	71,43	500	
1.1.1.1.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Jasa Administrasi	6	dokumen	6	100	0	0	0	
1.1.1.1.1.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2	dokumen	0	0	0		0	
1.1.1.1.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0			
1.1.1.1.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia				52		0	0	
1.1.1.1.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	paket	25	100	0	0	0	
1.1.1.1.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	orang	112	56	0	0	0	
1.1.1.1.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Workshop peraturan perundang-undangan	105	orang	0	0	0		0	
1.1.1.1.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				152,78		12,9	13,89	
1.1.1.1.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	0	0	0		0	
1.1.1.1.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	84	700	5	5,95	41,67	
1.1.1.1.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
1.1.1.1.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	1	100	0	0	0	
1.1.1.1.1.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	paket	7	58,33	0	0	0	
1.1.1.1.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.1 1.1.1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani				25		0	10,42	
1.1 1.1.1 1 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	0	0	5		41,67	
1.1 1.1.1 1 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	0	0	0		0	
1.1 1.1.1 1 2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2	laporan	1	50	0	0	0	
1.1 1.1.1 1 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	1	50	0	0	0	
1.1 1.1.1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berfungsi dengan baik				44,44		0	0	
1.1 1.1.1 1 2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	8	44,44	0	0	0	
1.1 1.1.1 1 2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		0		0		0			
1.1 1.1.1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Melek Huruf				60,53		0,42	0,42	
1.1 1.1.1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase pengelolaan pendidikan sekolah dasar				77,78		0,89	0,89	
1.1 1.1.1 2.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	85	unit	85	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah		0		0		0			
1.1 1.1.1 2.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100	paket	100	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	peserta didik	500	100	40	8	8	
1.1 1.1.1 2.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	200	orang	200	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	100	sekolah	100	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	101	sekolah	101	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	124	orang	0	0	0		0	
1.1 1.1.1 2.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1540	orang	0	0	0		0	
1.1 1.1.1 2.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	orang	100	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		0		0		0			
1.1 1.1.1 2 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama				50		0	0	
1.1 1.1.1 2.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8	unit	8	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	2	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		0		0		0			
1.1 1.1.1 2.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	420	orang	210	50	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23	satuan pendidikan	0	0	0		0	
1.1 1.1.1 2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25	satuan pendidikan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.1 1.1.1 2 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)				16,67		0	0	
1.1 1.1.1 2.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	paket	50	50	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	lembaga	0	0	0		0	
1.1 1.1.1 2.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	100	lembaga	0	0	0		0	
1.1 1.1.1 2 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan				75		0	0	
1.1 1.1.1 2.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	100	orang	50	50	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7	satuan pendidikan	7	100	0	0	0	
1.1 1.1.1 2.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		0		0		0			
1.1 1.1.1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4				100,00		-	0	
1.1 1.1.1 4 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Persentase Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan				100		0	0	
1.1 1.1.1 4.2.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	2	dokumen	2	100	0	0	0	
2.22 1.1.1 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Pertunjukan Seni				45,83		-	0	
2.22 1.1.1 2 2.01	Pengelolaan Masyarakat Dalam Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				41,66		0	0	
2.22 1.1.1 2.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	objek	1	33,33	0	0	0	
2.22 1.1.1 2.2.01.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100	orang	50	50	0	0	0	
2.22 1.1.1 2 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50		0	0	
2.22 1.1.1 2.2.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4	objek	0	0	0		0	
2.22 1.1.1 2.2.02.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	laporan	1	100	0	0	0	
2.22 1.1.1 2 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota								
2.22 1.1.1 2.2.03.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		0		0		0			
2.22 1.1.1 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan								
2.22 1.1.1 5 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota								
2.22 1.1.1 5.2.02.1	Pelindungan Cagar Budaya		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2.2	DINAS KESEHATAN								11,48	
1.2 1.2.2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				22,94		15,17	12,38	
1.2 1.2.2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perencanaan dang penganggaran				0		0	33,33	
1.2 1.2.2 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	0	0	2		100	
1.2 1.2.2 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	0	0	1		100	
1.2 1.2.2 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	laporan	0	0	1		33,33	
1.2 1.2.2 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	1	laporan	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan				37,46		60,39	30,11	
1.2 1.2.2 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	594	orang	296	49,83	567	191,55	95,45	
1.2 1.2.2 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	6	50	3	50	25	
1.2 1.2.2 1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen reviu/tanggapan pemeriksaan yang tersusun	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4	laporan	2	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase UPT Puskesmas/Labkesda/BKPM yang SudahTertib Dalam Administrasi Barang Milik Daerah				0		0	0	
1.2 1.2.2 1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia				39,86		28,57	14,29	
1.2 1.2.2 1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	unit	2	33,33	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	dokumen	2	50	4	200	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.2 1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	dokumen	2	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	2	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	orang	16	45,71	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang	20	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				40,63		8	4	
1.2 1.2.2 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	4	40	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	paket	16	47,06	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	paket	4	40	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50	1	50	25	
1.2 1.2.2 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13500	paket	6750	50	1485	22	11	
1.2 1.2.2 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	dokumen	12	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70	paket	34	48,57	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	dokumen	4	40	0	0	0	
1.2 1.2.2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berfungsi dengan baik				48		0	0	
1.2 1.2.2 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	12	48	0	0	0	
1.2 1.2.2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani				47,74		34,01	15,72	
1.2 1.2.2 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	laporan	74	49,33	1	1,35	0,67	
1.2 1.2.2 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13	laporan	6	46,15	4	66,67	30,77	
1.2 1.2.2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berfungsi dengan baik				35,09		32,81	15,12	
1.2 1.2.2 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	unit	14	46,67	7	50	23,33	
1.2 1.2.2 1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	unit	12	48	0	0	0	
1.2 1.2.2 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	16	45,71	13	81,25	37,14	
1.2 1.2.2 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0		0	0	
1.2 1.2.2 1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS TANJUNG RAMAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi pada perangkat daerah yang dievaluasi				0		0	0	
1.2 1.2.2 1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 1.2.13.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				31,30		8,41	11,74	
1.2 1.2.2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				32,44		0	0	
1.2 1.2.2 2.2.01.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7	unit	2	28,57	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.01.7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	1	unit	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	12	Unit	6	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai Standar	419	Unit	208	49,64	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	2	paket	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan	90	keluarga	44	48,89	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke	108	paket	54	50	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu Yang Memenuhi Target				30,54		8,43	13,11	
1.2 1.2.2 2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4118	orang	2058	49,98	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	3931	orang	1964	49,96	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3754	orang	1876	49,97	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19681	orang	9840	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30680	orang	15340	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575	orang	286	49,74	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16175	orang	8086	49,99	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500	orang	250	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500	orang	250	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90	orang	44	48,89	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5682	orang	2840	49,98	1381	48,63	24,3	
1.2 1.2.2 2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6226	orang	3112	49,98	1362	43,77	21,88	
1.2 1.2.2 2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	dokumen	2	40	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	dokumen	2	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dokumen	0	0	3		100	
1.2 1.2.2 2.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	orang	50	50	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.2 2.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1250	orang	624	49,92	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	Dokumen	0	0	3		100	
1.2 1.2.2 2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9	dokumen	4	44,44	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1250	orang	624	49,92	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	25	paket	12	48	25	208,33	100	
1.2 1.2.2 2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	57	unit	28	49,12	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	1	laporan	0	0	1		100	
1.2 1.2.2 2.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam	3	unit	0	0	1		33,33	
1.2 1.2.2 2.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4991	orang	2494	49,97	266	10,67	5,33	
1.2 1.2.2 2.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang-orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6278	orang	3138	49,98	15	0,48	0,24	
1.2 1.2.2 2.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1941	orang	970	49,97	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 2 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase data dan informasi kesehatan yang dipublikasikan melalui sistem informasi				46,15		0	0	
1.2 1.2.2 2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13	Dokumen	6	46,15	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.2 2 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar				32,72		25	22,5	
1.2 1.2.2 2.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti	5	unit	2	40	2	100	40	
1.2 1.2.2 2.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan	25	unit	12	48	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	14	Unit	6	42,86	0	0	0	
1.2 1.2.2 2.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2	dokumen	0	0	1		50	
1.2 1.2.2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia yang berkompeten				25,00		-	0	
1.2 1.2.2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan pada fasyankes di Kota Prabumulih				16,67		0	0	
1.2 1.2.2 3 2.02.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 3 2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24	orang	12	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 3 2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 3 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi kesehatan sesuai standar				50		0	0	
1.2 1.2.2 3 2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	120	Orang	60	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang				10,00		-	10	
1.2 1.2.2 4 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki				0		0	50	
1.2 1.2.2 4 2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko	2	dokumen	0	0	1		50	
1.2 1.2.2 4 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga S-PPIRT dan Nomor S-PKP bagi				0		0	0	
1.2 1.2.2 4 2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	2	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 4 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	Persentase sarana TPM yang melakukan usulan sertifikasi sanitasi laik higiene				0		0	0	
1.2 1.2.2 4 2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 4 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan dan sentra makanan yang diterbitkan stiker memenuhi syarat laik higiene				0		0	0	
1.2 1.2.2 4 2.05.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (DINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada	1	dokumen	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.2 4 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga yang mendapatkan pengawasan				50		0	0	
1.2 1.2.2 4.2.06.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	160	unit	80	50	0	0	0	
1.2 1.2.2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan Desa yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				-		-	11,11	
1.2 1.2.2 5 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta lintas sektor yang memanfaatkan anggaran untuk bidang kesehatan				0		0	33,33	
1.2 1.2.2 5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	dokumen	0	0	1		33,33	
1.2 1.2.2 5 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan publik yang bertemakan tentang germas				0		0	0	
1.2 1.2.2 5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pengembangan dan pelasanakan upaya kesehatan				0		0	0	
1.2 1.2.2 5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	dokumen	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2.31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								16,95	
1.2 1.2.31 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran				32,46		34,68	17,46	
1.2 1.2.31 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia				0		0	0	
1.2 1.2.31 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAP-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia				54,17		32,14	18,75	
1.2 1.2.31 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3888	Orang	2268	58,33	1944	85,71	50	, , , - GU belum terlaksana , , ,
1.2 1.2.31 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7	58,33	3	42,86	25	
1.2 1.2.31 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	1	100	0	0	0	
1.2 1.2.31 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu				58,33		28,57	16,67	
1.2 1.2.31 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7	58,33	2	28,57	16,67	
1.2 1.2.31 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia				35,37		42,53	18,52	
1.2 1.2.31 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	33,33	1	100	33,33	
1.2 1.2.31 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000	Dokumen	500	50	0	0	0	
1.2 1.2.31 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650	Laporan	378	58,15	265	70,11	40,77	
1.2 1.2.31 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia				0		0	0	
1.2 1.2.31 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia				50		100	50	
1.2 1.2.31 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	1	50	1	100	50	
1.2 1.2.31 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1	50	1	100	50	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.2 1.2.31 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				33,45		43,87	22,02	
1.2 1.2.31 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	10	50	6	60	30	
1.2 1.2.31 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147	Unit	74	50,34	53	71,62	36,05	
1.2 1.2.31 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery meningkat				0		0	0	
1.2 1.2.31 1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang pelayanan	1	Unit	0	0	0		0	
1.2 1.2.31 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit				49,69		12,50	6,25	
1.2 1.2.31 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				49,69		12,5	6,25	
1.2 1.2.31 2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	89	Unit	44	49,44	0	0	0	
1.2 1.2.31 2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150	Unit	74	49,33	0	0	0	
1.2 1.2.31 2.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis	2	Unit	1	50	0	0	0	
1.2 1.2.31 2.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2	Paket	1	50	0,5	50	25	
1.2 1.2.31 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				50,00		100,00	50	
1.2 1.2.31 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				50		100	50	
1.2 1.2.31 3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2	Orang	1	50	1	100	50	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.3.3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								36,28	
1.3 1.3.3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas				24,14		2,46	38,79	
1.3 1.3.3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	73,33	
1.3 1.3.3 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	0	2		66,67	
1.3 1.3.3 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	1		100	
1.3 1.3.3 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	0	0	1		100	
1.3 1.3.3 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	1		100	
1.3 1.3.3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				233,33		23,81	166,67	
1.3 1.3.3 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55	org/bln	385	700	275	71,43	500	
1.3 1.3.3 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	dok	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir	1	lap	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0	50	
1.3 1.3.3 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	lap	0	0	2		50	
1.3 1.3.3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0	0	
1.3 1.3.3 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100	paket	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10	org	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0	4,48	
1.3 1.3.3 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	paket	0	0	1		20	
1.3 1.3.3 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	paket	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6	paket	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16	paket	0	0	1		6,25	
1.3 1.3.3 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	paket	0	0	1		16,67	
1.3 1.3.3 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	dok	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	53	paket	0	0	1		1,89	
1.3 1.3.3 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	lap	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.3 1.3.3 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	lap	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	7	dok	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	16,67	
1.3 1.3.3 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	unit	0	0	1		50	
1.3 1.3.3 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	unit	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15	unit	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	50	
1.3 1.3.3 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	lap	0	0	2		50	
1.3 1.3.3 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	lap	0	0	2		50	
1.3 1.3.3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	4,45	
1.3 1.3.3 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	unit	0	0	1		6,67	
1.3 1.3.3 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	unit	0	0	1		6,67	
1.3 1.3.3 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap								
1.3 1.3.3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kota								
1.3 1.3.3 10.2.01.31	Penggantian Jembatan		0		0		0			
1.3 1.3.3 10.2.01.32	Pembangunan Jalan		0		0		0			
1.3 1.3.3 10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan		0		0		0			
1.3 1.3.3 10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan		0		0		0			
1.3 1.3.3 10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		0		0		0			
1.3 1.3.3 10.2.01.44	Rehabilitasi Jalan		0		0		0			
1.3 1.3.3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi								
1.3 1.3.3 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1.3 1.3.3 11.2.02.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		0		0		0			
1.3 1.3.3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase realisasi rencana struktur ruang sesuai dengan peraturan rencana tata ruang wilayah								
1.3 1.3.3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)								
1.3 1.3.3 12.2.01.10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		0		0		0			
1.3 1.3.3 12.2.01.012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.3 1.3.3 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.3 1.3.3 12.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)		0		0		0			
1.3 1.3.3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Masyarakat yang terlayani Air minum				-		-	0	
1.3 1.3.3 3 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah				0		0	0	
1.3 1.3.3 3.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	38	SR	0	0	0		0	
1.3 1.3.3 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Kondisi Baik								
1.3 1.3.3 6 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai								
1.3 1.3.3 6.2.01.28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		0		0		0			
1.3 1.3.3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung pemerintah dan fasilitas umum yang layak pakai								
1.3 1.3.3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin								
1.3 1.3.3 8.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0			
1.3 1.3.3 8.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG , Sertifikat Laik Fungsi SLF , Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung		0		0		0			
2.10 1.3.3 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase terlaksananya penataan tanah				-		-	0	
2.10 1.3.3 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota				0		0	0	
2.10 1.3.3 10.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kab/Kota	1	dok	0	0	0		0	
2.10 1.3.3 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Administrasi Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan								
2.10 1.3.3 5 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Kepala Daerah tentang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk								
2.10 1.3.3 5.2.01.5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.4.4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								11,19	
1.4.1.4.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah				43,38		27,48	16,51	
1.4.1.4.4.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				0		0	0	
1.4.1.4.4.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0	0		0	
1.4.1.4.4.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.4.1.4.4.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.4.1.4.4.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.4.1.4.4.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan				54,17		21,43	12,5	
1.4.1.4.4.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	7	58,33	3	42,86	25	
1.4.1.4.4.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Uang Jasa Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	7	58,33	3	42,86	25	
1.4.1.4.4.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.4.1.4.4.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
1.4.1.4.4.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah yang akurat				58,33		42,86	25	
1.4.1.4.4.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	Bulan	7	58,33	3	42,86	25	
1.4.1.4.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum kantor				63,96		47,96	30,96	
1.4.1.4.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik (lampu,baterai,kabel,dll)	16	jenis	7	43,75	3	42,86	18,75	
1.4.1.4.4.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25	jenis	12	48	6	50	24	
1.4.1.4.4.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediaanya obat-obatan dan makan minum rapat / tamu	4600	kotak	2300	50	1150	50	25	
1.4.1.4.4.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan (fotokopi,spanduk,map, buku, Buku blanko SSP, karcis/	50	Lembar, Meter,	50	100	25	50	50	
1.4.1.4.4.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar	100	Eks	50	50	25	50	25	
1.4.1.4.4.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis kantor	50	jenis	50	100	25	50	50	
1.4.1.4.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	50	Kali	28	56	12	42,86	24	
1.4.1.4.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37,5		25	12,5	
1.4.1.4.4.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	800	lembar	400	50	200	50	25	
1.4.1.4.4.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, Telpo dan internet	4	Rekening	1	25	0	0	0	
1.4.1.4.4.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah				37,78		20,95	10	
1.4.1.4.4.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Pajak kendaraan, Suku Cadang dan	30	Kendaraan	14	46,67	6	42,86	20	
1.4.1.4.4.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Jenis	5	50	1	20	10	
1.4.1.4.4.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	1	16,67	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.3 1.4.4 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap				-		-	0	
1.3 1.4.4 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Jalan Kota				0		0	0	
1.3 1.4.4 10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak/Lingkungan	1,1	km	0	0	0		0	
1.3 1.4.4 10.2.01.44	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan Setapak/Lingkungan	0,5	km	0	0	0		0	
1.3 1.4.4 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang dikelola				-		-	0	
1.3 1.4.4 2 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan				0		0	0	
1.3 1.4.4 2.1.119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan Sumur air tanah untuk air baku	3	Unit	0	0	0		0	
1.3 1.4.4 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pelayanan Persampahan				53,85		-	0	
1.3 1.4.4 4 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan persampahan di kabupaten/kota				53,85		0	0	
1.3 1.4.4 4.2.01.12	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang disediakan	13	13	7	53,85	0	0	0	
1.3 1.4.4 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat				-		-	0	
1.3 1.4.4 6 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Sistem Drainase				0		0	0	
1.3 1.4.4 6.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (	Pembangunan Sistem drainase lingkungan	0,5	km	0	0	0		0	
1.3 1.4.4 6.2.01.28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya sistem drainase lingkungan	3	km	0	0	0		0	
1.4 1.4.4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana				-		-	0	
1.4 1.4.4 2 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/kota				0		0	0	
1.4 1.4.4 2.2.01.9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	1	dokumen	0	0	0		0	
1.4 1.4.4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				25,00		-	0	
1.4 1.4.4 5 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terbangun				25		0	0	
1.4 1.4.4 5.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2	Dok	0	0	0		0	
1.4 1.4.4 5.2.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Unit	5	50	0	0	0	
2.11 1.4.4 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan dan penanganan sampah				50,00		-	0	
2.11 1.4.4 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan di kabupaten/kota				50		0	0	
2.11 1.4.4 11.2.01.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	100	persen	50	50	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.5.5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								54,70	
1.5 1.5.5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				-		-	81,04	
1.5 1.5.5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung				0		0	80	
1.5 1.5.5 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	0	3		100	
1.5 1.5.5 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	1		100	
1.5 1.5.5 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-P SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.5 1.5.5 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	Laporan	0	0	2		100	
1.5 1.5.5 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	1		100	
1.5 1.5.5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung				0		0	160,42	
1.5 1.5.5 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang	0	0	156		600	karena jumlah pegawai berkurang,
1.5 1.5.5 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	5		41,67	
1.5 1.5.5 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	0	0	0		0	
1.5 1.5.5 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	0	0	0		0	
1.5 1.5.5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				0		0	0	
1.5 1.5.5 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
1.5 1.5.5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0	100	
1.5 1.5.5 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	Paket	0	0	45		100	
1.5 1.5.5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Perwujudnya Penatausahaan Umum Perangkat Daerah				0		0	52,68	
1.5 1.5.5 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Paket	0	0	3		50	
1.5 1.5.5 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15	Paket	0	0	10		66,67	
1.5 1.5.5 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang d sediakan	12	Paket	0	0	6		50	
1.5 1.5.5 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	0	0	6		50	
1.5 1.5.5 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	0	4		33,33	
1.5 1.5.5 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	21	Paket	0	0	15		71,43	
1.5 1.5.5 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	0	0	6		50	
1.5 1.5.5 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	0	6		50	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.5 1.5.5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	100	
1.5 1.5.5 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	0	0	1		100	
1.5 1.5.5 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Saranan dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	Unit	0	0	3		100	
1.5 1.5.5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Urusan Penujang Pemerintah				0		0	56,25	
1.5 1.5.5 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	5		41,67	
1.5 1.5.5 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	0	0	5		41,67	
1.5 1.5.5 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	0	0	9		75	
1.5 1.5.5 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	0	0	8		66,67	
1.5 1.5.5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	100	
1.5 1.5.5 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	0	0	7		100	
1.5 1.5.5 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	0	0	1		100	
8.1 1.5.5 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pengendalian Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditetapkan				-		-	0	
8.1 1.5.5 2 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter				0		0	0	
8.1 1.5.5 2.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	60	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	170	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pengendalian Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik yang di tetapkan				-		-	0	
8.1 1.5.5 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Persentase angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu				0		0	0	
8.1 1.5.5 3.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1	Laporan	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi,	50	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 3.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	458	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 3.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1	Laporan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
8.1 1.5.5 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengendalian Organisasi Kemasyarakatan				-		-	0	
8.1 1.5.5 4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan				0		0	0	
8.1 1.5.5 4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas,	114	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 4.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Hasil Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas,	1	Laporan	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pengendalian Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				-		-	0	
8.1 1.5.5 5 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan				0		0	0	
8.1 1.5.5 5.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	95	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 5.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	12	Laporan	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase Pengendalian Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik Sosial				-		-	0	
8.1 1.5.5 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan				0		0	0	
8.1 1.5.5 6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	15	Orang	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 6.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	1	Laporan	0	0	0		0	
8.1 1.5.5 6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	1	Dokumen	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.5.6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN								35,35	
1.5 1.5.6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				78,22		44,93	36,09	
1.5 1.5.6 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu				100		0	0	
1.5 1.5.6 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	dokumen	1	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	laporan	2	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu				64,58		42,86	35,42	
1.5 1.5.6 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	orang	68	100	68	100	100	
1.5 1.5.6 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
1.5 1.5.6 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	laporan	0	0	0		0	
1.5 1.5.6 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kauangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1	laporan	1	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu				50		0	0	
1.5 1.5.6 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	1	50	0	0	0	
1.5 1.5.6 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pakaian dinas yang terpenuhi				0,6		0	0	
1.5 1.5.6 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	166	paket	1	0,6	0	0	0	
1.5 1.5.6 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran				78,57		43,01	29,07	
1.5 1.5.6 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	paket	4	100	2	50	50	
1.5 1.5.6 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
1.5 1.5.6 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
1.5 1.5.6 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	1	dokumen	1	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12	paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
1.5 1.5.6 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	laporan	3	75	1	33,33	25	
1.5 1.5.6 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	laporan	145	100	5	3,45	3,45	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.5 1.5.6 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100		100	100	
1.5 1.5.6 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4	unit	4	100	4	100	100	
1.5 1.5.6 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79,16		69,28	42,5	
1.5 1.5.6 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	500	laporan	500	100	50	10	10	
1.5 1.5.6 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	7	58,33	9	128,57	75	
1.5 1.5.6 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				93,94		107,41	100	
1.5 1.5.6 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	11	unit	9	81,82	11	122,22	100	
1.5 1.5.6 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	unit	1	100	1	100	100	
1.5 1.5.6 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	15	unit	15	100	15	100	100	
1.5 1.5.6 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				84,17		37,50	32,5	
1.5 1.5.6 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kenetraman dan Ketertiban Umum				86		38,33	34	
1.5 1.5.6 2.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	3	dokumen	3	100	0	0	0	
1.5 1.5.6 2.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman	5	dokumen	4	80	1	25	20	
1.5 1.5.6 2.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yag ditingkatkan kapasitasnya	125	orang	125	100	125	100	100	
1.5 1.5.6 2.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah laporan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	4	laporan	3	75	1	33,33	25	
1.5 1.5.6 2.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui	4	laporan	3	75	1	33,33	25	
1.5 1.5.6 2 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda/ Perkada yang ditegakan				75		33,33	25	
1.5 1.5.6 2.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	4	laporan	3	75	1	33,33	25	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
1	2	3	4	5	VOL	%	VOL	%	10=8/4*100	
						7=6/4*100		9=8/6*100		
1.5.7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1.5 1.5.7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-								
1.5 1.5.7 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.5 1.5.7 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-								
1.5 1.5.7 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
1.5 1.5.7 3.2.01.3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
1.5 1.5.7 3.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-								
1.5 1.5.7 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1.5 1.5.7 4.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0			*****
1.5 1.5.7 4.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		0		0		0			*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.6.8	DINAS SOSIAL								15,49	
1.6 1.6.8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				-		-	30,38	
1.6 1.6.8 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu				0		0	12,5	
1.6 1.6.8 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	0	0	5		62,5	*****
1.6 1.6.8 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2	Laporan	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Disampaikan Tepat Waktu				0		0	35,42	
1.6 1.6.8 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang	0	0	23		100	*****
1.6 1.6.8 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	5		41,67	*****
1.6 1.6.8 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan	4	Laporan	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian Dinas yang terpenuhi				0		0	0	
1.6 1.6.8 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	Paket	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				0		0	22,45	
1.6 1.6.8 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	0	0	3		25	*****
1.6 1.6.8 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	0	0	2		16,67	*****
1.6 1.6.8 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dokumen	0	0	5		25	*****
1.6 1.6.8 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang diseidkan	12	Paket	0	0	3		25	*****
1.6 1.6.8 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	0	0	2		50	
1.6 1.6.8 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	Laporan	0	0	26		17,93	*****
1.6 1.6.8 1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1	Dokumen	0	0	0,2		20	*****
1.6 1.6.8 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	84,89	
1.6 1.6.8 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	0	0	2		200	
1.6 1.6.8 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	22	Paket	0	0	12		54,55	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.6 1.6.8 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4	Unit	0	0	1		25	
1.6 1.6.8 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5	Unit	0	0	3		60	
1.6 1.6.8 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	0	
1.6 1.6.8 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	600	Laporan	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				0		0	22,22	
1.6 1.6.8 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	10	Unit	0	0	2		20	
1.6 1.6.8 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	15	Unit	0	0	7		46,67	
1.6 1.6.8 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga/ Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam penanganan masalah PMKS				-		-	0	
1.6 1.6.8 2 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat				0		0	0	
1.6 1.6.8 2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	2022	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	106	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 2.2.03.04	Peningkatan KemampuanPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	Lembaga	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi Sosial diluar Panti				-		-	0	
1.6 1.6.8 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial				0		0	0	
1.6 1.6.8 4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	171	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	50	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta KelSurat Nikah, dan/atau	10	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	26287	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	171	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	6618	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot	420	Orang	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
1.6 1.6.8 4 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku				0		0	0	
1.6 1.6.8 4.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	631	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	171	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 4.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1.6 1.6.8 5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1.6 1.6.8 5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0			*****
1.6 1.6.8 5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0			*****
1.6 1.6.8 5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		0		0		0			
1.6 1.6.8 5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		0		0		0			*****
1.6 1.6.8 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				-		-	0	
1.6 1.6.8 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				0		0	0	
1.6 1.6.8 6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1300	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	1300	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Unit	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	0	0	0		0	
1.6 1.6.8 6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				0		0	0	
1.6 1.6.8 6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara				-		-	0	
1.6 1.6.8 7 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional/ Kota				0		0	0	
1.6 1.6.8 7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	Makam	0	0	0		0	*****
1.6 1.6.8 7.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	Laporan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.7.9	DINAS TENAGA KERJA								21,51	
2.7 2.7.9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan				3,72		3,06	21,43	
2.7 2.7.9 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	20	
2.7 2.7.9 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	0	0	1		50	
2.7 2.7.9 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	laporan	0	0	1		50	
2.7 2.7.9 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pembayarn gaji dan penatausahaan keuangan				7,14		0	28,57	
2.7 2.7.9 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	48	Orang	24	50	0	0	0	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	Orang	0	0	47		100	
2.7 2.7.9 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	0	0	1		100	
2.7 2.7.9 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	laporan	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulan/ triwulan/semesteran	1	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1	laporan	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan penatausahaan barang				0		0	100	
2.7 2.7.9 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	0	0	1		100	
2.7 2.7.9 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Disiplin Apartur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fugsi Dinas Tenaga				0		0	0	
2.7 2.7.9 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga pegawai	90	Stel	0	0	0		0	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	paket	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	44	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Diklat TupoksiOrang	3	Orang	0	0	0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.7 2.7.9 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya adm umum dinas				0		0	27,71	
2.7 2.7.9 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	15	Alat	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	paket	0	0	8		53,33	
2.7 2.7.9 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah tangga	25	Alat	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	paket	0	0	25		100	
2.7 2.7.9 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediaanya makan dan minum rapat	720	Kotak	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500	paket	0	0	200		40	
2.7 2.7.9 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak/Penggandaan sesuai Kebutuhan	10	Jenis	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	paket	0	0	4		40	
2.7 2.7.9 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan sesuai kebutuhan	1800	Eks	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	50	Jenis	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50	paket	0	0	30		60	
2.7 2.7.9 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediaanya makan dan minum tamu	200	Kotak	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	0	0	1		100	
2.7 2.7.9 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Volume perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	180	Kali	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	0	0	1		50	
2.7 2.7.9 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan gedung kantor dibanding jumlah pegawai				16,67		16,67	16,67	
2.7 2.7.9 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	unit	9	100	9	100	100	
2.7 2.7.9 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin	5	Unit	0	0	0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	unit	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana pendukung gedung kantor	3	Unit	0	0	0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	2	unit	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan dinas				9,72		11,9	12,5	
2.7 2.7.9 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 10000	400	Buah	0	0	0		0	,,,,,,
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1	Laporan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.7 2.7.9 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa langganan listrik dan komunikasi	4	Rekening	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	14	58,33	10	71,43	41,67	
2.7 2.7.9 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa jaga malam kantor, kebersihan kantor dan taman	3	Orang	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	0	0	1		33,33	
2.7 2.7.9 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris yang layak pakai				0		0	20,19	
2.7 2.7.9 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / kendaraan dinas jabatan yang layak pakai	8	Unit	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	unit	0	0	5		41,67	
2.7 2.7.9 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	UNIT	0	0	0	0	0	
2.7 2.7.9 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang terpelihara	1	Unit	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	0	1		100	
2.7 2.7.9 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	10	Unit	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	0	0	4		40	
2.7 2.7.9 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	15	Unit	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	15	unit	0	0	0	0	0	
2.7 2.7.9 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terbina Kompetensi				-		-	22,6	
2.7 2.7.9 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peningkatan kualitas pencari kerja melalui pelatihan kompetensi dana APBD				0		0	25	
2.7 2.7.9 3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan kompetensi	160	Orang	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah tenaga Kerja Yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun N	32	orang	0	0	16		50	
2.7 2.7.9 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang dibina				0		0	15,38	
2.7 2.7.9 3.2.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK swasta yang dibina	13	LPK Swasta	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina	13	Lembaga	0	0	4		30,77	
2.7 2.7.9 3 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitas				0		0	50	
2.7 2.7.9 3.2.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina produktivitas	10	Perusahaan	0	0	0	0	0	,,,,,,
		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	30	Perusahaan	0	0	30		100	
2.7 2.7.9 3 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan di perusahaan				0		0	0	
2.7 2.7.9 3.2.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang dibina	100	Orang	0	0	0	0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Di Tingkat Daerah	20	Dokumen	0	0	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.7 2.7.9 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan				-		-	12,99	
2.7 2.7.9 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pencari kerja yang ditempatkan				0		0	18,19	
2.7 2.7.9 4.2.01.2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	1300	Orang	0	0	0		0	
		Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	65	orang	0	0	18		27,69	
2.7 2.7.9 4.2.01.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25	orang	0	0	8		32	
2.7 2.7.9 4.2.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon wirausaha yang dibina dibantu alat usaha	65	Orang	0	0	0		0	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	32	orang	0	0	10		31,25	
2.7 2.7.9 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya informasi pasar kerja				0		0	0	
2.7 2.7.9 4.2.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang Ikut Pasar Kerja	10	Perusahaan	0	0	0		0	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursaa Kerj	50	orang	0	0	0		0	
2.7 2.7.9 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tingkat Penyelesaian Kasus				33,33		33,33	40	
2.7 2.7.9 5 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Jumlah peraturan perusahaan yang terdaftar dan dilegitimasi				100		100	100	
2.7 2.7.9 5.2.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan	35	perusahaan	35	100	35	100	100	
2.7 2.7.9 5 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				0		0	10	
2.7 2.7.9 5.2.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dimediasikan	10	Kasus	0	0	0		0	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10	Perkara	0	0	2		20	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9.11	DINAS KETAHANAN PANGAN								9,88	
2.9 2.9.11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				41,26		15,22	17,19	
2.9 2.9.11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD disampaikan tepat waktu				20		0	0	
2.9 2.9.11 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu				50		25	40	
2.9 2.9.11 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/Bulan	0	0	21		60	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu				0		0	0	
2.9 2.9.11 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi				100		0	0	
2.9 2.9.11 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	Paket	30	100	0	0	0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	2	100	0	0	0	
2.9 2.9.11 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran				0		0	0	
2.9 2.9.11 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien				100		66,67	66,67	
2.9 2.9.11 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	8	100	8	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	6	100	6	100	100	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	100	0	0	0	~,
2.9 2.9.11 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien				0		0	0	
2.9 2.9.11 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				74,44		25	17,67	
2.9 2.9.11 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Unit	12	63,16	4	33,33	21,05	,,,,,,
2.9 2.9.11 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	6	85,71	1	16,67	14,29	,,,,,,
2.9 2.9.11 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				16,15		-	0	
2.9 2.9.11 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				22,22		0	0	
2.9 2.9.11 3.2.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.9 2.9.11 3.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Laporan	0	0	0		0	
2.9 2.9.11 3.2.01.7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Keluarga	100	100	0	0	0	
2.9 2.9.11 3.2.01.8	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	0	0		0	
2.9 2.9.11	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	Unit	0	0	0		0	
2.9 2.9.11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.9 2.9.11 3.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	0	0		0	
2.9 2.9.11	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.9 2.9.11	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.9 2.9.11 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota				5		0	0	
2.9 2.9.11 3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Ton	1	10	0	0	0	
2.9 2.9.11 3.2.02.5	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10	Ton	0	0	0		0	
2.9 2.9.11 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman				0		0	0	
2.9 2.9.11 3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.9 2.9.11 3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	2	Laporan	0	0	0		0	
2.9 2.9.11 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan				-		-	0	
2.9 2.9.11 4 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan				0		0	0	
2.9 2.9.11 4.2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
2.9 2.9.11 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				100,00		-	0	
2.9 2.9.11 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan				100		0	0	
2.9 2.9.11 5.2.01.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.9 2.9.11 5.2.01.7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.9 2.9.11 5.2.01.9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	1	100	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.11.12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								1,30	
2.11 2.11.12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD				24,79		4,01	2,36	
2.11 2.11.12 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat				60		0	0	
2.11 2.11.12 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen	1	100	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Anggaran	1	Dokumen	1	100	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Anggaran	1	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan AKIP	1	Laporan	1	100	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan monitoring dan evaluasi bidang Lingkungan Hidup, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perjanjian	3	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tersedia				28,57		2,08	1,34	
2.11 2.11.12 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Slip Gaji ASN, Gaji 13 dan 14	700	Orang/Bulan	450	64,29	37,39	8,31	5,34	*****
2.11 2.11.12 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN Pengelola Keuangan	1	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Daftar Transaksi Pajak	2	Laporan	1	50	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah				0		0	0	
2.11 2.11.12 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Pengelola Barang	1	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur				16,67		0	0	
2.11 2.11.12 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev dan Penilaian Kinerja, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	2	Dokumen	1	50	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	5	Orang	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum				6,25		0	0	
2.11 2.11.12 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1	Paket	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1	Paket	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket ATK yang dibutuhkan	100	Jenis	50	50	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pemerintahan daerah yang tersedia				19,44		33,33	19,44	
2.11 2.11.12 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	1	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah struk pembayaran air dan listrik	1	Laporan	0	0	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas pengelola pertamanan	12	Laporan	7	58,33	7	100	58,33	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.11 2.11.12 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara				32,22		0	0	
2.11 2.11.12 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	14	50	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	7	46,67	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	0	0	0		0	*****
2.11 2.11.12 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				50,00		-	0	
2.11 2.11.12 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				50		0	0	
2.11 2.11.12 10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		0		0		0			*****
2.11 2.11.12 10.2.01.4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	10	Pengaduan	5	50	0	0	0	
2.11 2.11.12 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan dan penanganan sampah				-		-	0	
2.11 2.11.12 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang berkurang				0		0	0	
2.11 2.11.12 11.2.01.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Laporan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.11 2.11.12 11.2.01.8	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jakstrada Pengelolaan Sampah	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 11.2.01.17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA,	Persentase penanganan sampah	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 11.2.01.18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Persentase pengurangan sampah	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan				-		-	0	
2.11 2.11.12 2 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH				0		0	0	
2.11 2.11.12 2.2.01.6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RPPLH	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 2 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS				0		0	0	
2.11 2.11.12 2.2.02.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 2.2.02.5	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan Dokumen KLHS RTR	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air				13,81		-	0	
2.11 2.11.12 3 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Sampel IKU dan IKA yang dipantau				27,62		0	0	
2.11 2.11.12 3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Terwujudnya pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara	5	Titik Sampel	2	40	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 3.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terwujudnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	7	Titik Sampel	3	42,86	0	0	0	*****
2.11 2.11.12 3.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terwujudnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 3 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD				0		0	0	
2.11 2.11.12 3.2.02.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Status Lingkungan Hidup Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.11 2.11.12 3 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan yang Tidak terselesaikan				0		0	0	
2.11 2.11.12 3.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Laporan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 3.2.03.13	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Identifikasi Kerusakan Lahan	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan				-		-	0	
2.11 2.11.12 4 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dipelihara				0		0	0	
2.11 2.11.12 4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Volume Sampah B3 yang terkelola				-		-	0	
2.11 2.11.12 5 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Izin Sementara Penyimpanan Limbah B3				0		0	0	
2.11 2.11.12 5.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Laporan Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 5 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam Kabupaten/Kota				0		0	0	
2.11 2.11.12 5.2.02.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase Jumlah Kegiatan atau Usaha yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				25,00		-	0	
2.11 2.11.12 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Kegiatan/Usaha yang Memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang Terawasi				25		0	0	
2.11 2.11.12 6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 6.2.01.5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12	Badan Usaha	6	50	0	0	0	
2.11 2.11.12 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok masyarakat yang dibina				-		-	0	
2.11 2.11.12 8 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina				0		0	0	
2.11 2.11.12 8.2.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	1	Laporan	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 8.2.01.5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang	1	Lembaga	0	0	0		0	
2.11 2.11.12 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat				-		-	0	
2.11 2.11.12 9 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan yang Diberikan				0		0	0	
2.11 2.11.12 9.2.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata, Kalpataru dan Rumah Bersih	3	Penghargaan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.12.13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								37,66	
2.12 2.12.13 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				63,78		60,71	39,51	
2.12 2.12.13 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63,33		50	36,67	
2.12 2.12.13 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2	66,67	1	50	33,33	
2.12 2.12.13 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.12 2.12.13 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.12 2.12.13 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.12 2.12.13 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	1	50	1	100	50	
2.12 2.12.13 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				54,11		42,86	24,95	
2.12 2.12.13 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518	Orang/Bulan	301	58,11	258	85,71	49,81	
2.12 2.12.13 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7	58,33	6	85,71	50	
2.12 2.12.13 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
2.12 2.12.13 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.12 2.12.13 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah				58,33		142,86	83,33	
2.12 2.12.13 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7	58,33	10	142,86	83,33	
2.12 2.12.13 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100		25	25	
2.12 2.12.13 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100	0	0	0	
2.12 2.12.13 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	100	25	50	50	
2.12 2.12.13 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				58,73		62,95	37,02	
2.12 2.12.13 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	6	85,71	50	
2.12 2.12.13 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	0	0	0	
2.12 2.12.13 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
2.12 2.12.13 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
2.12 2.12.13 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7	58,33	4	57,14	33,33	
2.12 2.12.13 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13	Paket	8	61,54	6	75	46,15	
2.12 2.12.13 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
2.12 2.12.13 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	28	58,33	20	71,43	41,67	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.12 2.12.13 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68,75		78,57	56,25	
2.12 2.12.13 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	58,33	4	57,14	33,33	
2.12 2.12.13 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	14	58,33	12	85,71	50	
2.12 2.12.13 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
2.12 2.12.13 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.12 2.12.13 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58,33		85,71	50	
2.12 2.12.13 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	7	58,33	6	85,71	50	
2.12 2.12.13 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan				100,00		100,00	100	
2.12 2.12.13 2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100		100	100	
2.12 2.12.13 2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.12 2.12.13 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran, Persentase Penerbitan Akta Kematian, Persentase Penerbitan Akta				58,10		30,12	17,5	
2.12 2.12.13 3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil				58,1		30,12	17,5	
2.12 2.12.13 3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000	Layanan	1162	58,1	350	30,12	17,5	
2.12 2.12.13 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang di kelola				50,00		25,00	25	
2.12 2.12.13 4 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				0		0	0	
2.12 2.12.13 4.2.01.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	Dokumen	0	0	0	0	0	
2.12 2.12.13 4 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				66,67		33,33	33,33	
2.12 2.12.13 4.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	1	Laporan	0	0	0	0	0	
2.12 2.12.13 4.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.12 2.12.13 4.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.12 2.12.13 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase terlaksananya tata Kelola Profil Kependudukan				-		-	0	
2.12 2.12.13 5 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersusunya Profil Kependudukan yang Valid				0		0	0	
2.12 2.12.13 5.2.01.2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	Dokumen	0	0	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.14.10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								38,96	
2.14 2.14.10 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				80,80		59,84	58,44	
2.14 2.14.10 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80		60	60	
2.14 2.14.10 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	100	2	100	100	*****
2.14 2.14.10 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
2.14 2.14.10 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
2.14 2.14.10 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
2.14 2.14.10 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tepat waktu				100		75	75	
2.14 2.14.10 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang	31	100	31	100	100	*****
2.14 2.14.10 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	*****
2.14 2.14.10 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.14 2.14.10 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang akurat				100		100	100	
2.14 2.14.10 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
2.14 2.14.10 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum				88,54		43,93	35,21	
2.14 2.14.10 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	*****
2.14 2.14.10 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	*****
2.14 2.14.10 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1	Paket	1	100	0	0	0	*****
2.14 2.14.10 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	*****
2.14 2.14.10 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	*****
2.14 2.14.10 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
2.14 2.14.10 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	50	50	40	80	40	*****
2.14 2.14.10 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah				0		0	0	
2.14 2.14.10 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.14 2.14.10 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				66,67		66,67	100	
2.14 2.14.10 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.14 2.14.10 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.14 2.14.10 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Laporan	0	0	1		100	
2.14 2.14.10 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				50		125	62,5	
2.14 2.14.10 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	72	Unit	36	50	45	125	62,5	
2.14 2.14.10 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk				80,00		20,00	20	
2.14 2.14.10 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Persentase Perangkat (Dinas/badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB				75		50	50	
2.14 2.14.10 2.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan grand design Pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.14 2.14.10 2.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis	12	Organisasi	6	50	0	0	0	
2.14 2.14.10 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan				83,33		0	0	
2.14 2.14.10 2.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga	6	Laporan	3	50	0	0	0	
2.14 2.14.10 2.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)				67,47		42,16	26,23	
2.14 2.14.10 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peserta Kb aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				91,67		33,33	33,33	
2.14 2.14.10 3.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.14 2.14.10 3.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) Rapat koordinasi	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.14 2.14.10 3.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program bangsa kencana keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangsa kencana sesuai kearifan budaya local	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3.2.01.14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangsa kencana kepada stake holder dan mitra kerja	10	Organisasi	5	50	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.14 2.14.10 3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				50		0	0	
2.14 2.14.10 3.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	200	Orang	200	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	6	Organisasi	0	0	0		0	
2.14 2.14.10 3.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga	6	Laporan	3	50	0	0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	6	Laporan	3	50	0	0	0	
2.14 2.14.10 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				54,76		63,64	31,82	
2.14 2.14.10 3.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas	1	Laporan	1	100	0	0	0	
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1320	Orang	660	50	300	45,45	22,73	,,,,,,
2.14 2.14.10 3.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3	Unit	0	0	0		0	
2.14 2.14.10 3.2.03.8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	1	Laporan	0	0	0		0	
2.14 2.14.10 3.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan Kb bergerak	6	Laporan	6	100	6	100	100	
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6	Laporan	2	33,33	6	300	100	
2.14 2.14.10 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase Perangkat (Dinas/badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB				74,32		77,78	37,84	
2.14 2.14.10 3.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.14 2.14.10 3.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana	37	Kampung	18	48,65	28	155,56	75,68	
2.14 2.14.10 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan				41,67		50,00	33,33	
2.14 2.14.10 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				62,5		75	50	
2.14 2.14.10 4.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat,	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.14 2.14.10 4.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	2	Unit	1	50	0	0	0	
2.14 2.14.10 4.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	40	Orang	20	50	40	200	100	
2.14 2.14.10 4.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	40	Orang	20	50	0	0	0	
2.14 2.14.10 4 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam	Capaian PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang ber-KB Mandiri				0		0	0	
2.14 2.14.10 4.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calun PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran,	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	1	Laporan	0	0	0		0	
2.14 2.14.10 4.2.02.06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk emaja calon pengantin/calun PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	1	Laporan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.8 2.14.10 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				100,00		66,67	66,67	
2.8 2.14.10 2 2.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/OPD yang mengikuti serangkaian PUG dan peningkatan kapasitas program PPRG				100		0	0	
2.8 2.14.10 2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG kewenangan kabupaten/kota	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.8 2.14.10 2 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100		100	100	
2.8 2.14.10 2.2.03.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat advokasi dan	24	Lembaga	24	100	24	100	100	
2.8 2.14.10 2.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat	15	Orang	15	100	15	100	100	
2.8 2.14.10 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani oleh instansi terkait				100,00		56,00	56	
2.8 2.14.10 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibidang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan				100		100	100	
2.8 2.14.10 3.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap	1	Dokumen	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.8 2.14.10 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani				100		12	12	
2.8 2.14.10 3.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	25	Layanan	25	100	3	12	12	
2.8 2.14.10 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan terhadap anak korban kekerasan				30,00		-	0	
2.8 2.14.10 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan				25		0	0	
2.8 2.14.10 7.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA Jumlah	20	Orang	0	0	0		0	
		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20	Orang	10	50	0	0	0	
2.8 2.14.10 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Jumlah Kasus kekerasan anak yang diselesaikan				25		0	0	
2.8 2.14.10 7.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10	Orang	5	50	0	0	0	
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10	Orang	0	0	0		0	
2.8 2.14.10 7 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan				50		0	0	
2.8 2.14.10 7.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	20	Orang	10	50	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.13.14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								36,10	
2.13 2.13.14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				-		-	43,09	
2.13 2.13.14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	50	
2.13 2.13.14 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	1	Dokumen	0	0	1		100	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	1		100	
2.13 2.13.14 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD.	1	Dokumen	0	0	1		100	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	1		100	
2.13 2.13.14 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	1	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan				0		0	39,29	
2.13 2.13.14 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia.	18	Orang/Bulan	0	0	0		0	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	Orang/Bulan	0	0	90		35,71	
2.13 2.13.14 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0		0		0			
2.13 2.13.14 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	0	0	1		100	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	0	0	1		100	
2.13 2.13.14 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				0		0	100	
2.13 2.13.14 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	1		100	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	1		100	
2.13 2.13.14 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0	0	
2.13 2.13.14 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor.	1	Paket	0	0	0		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia.	1	Paket	0	0	0		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.13 2.13.14 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah yang Terselenggara.	1	Paket	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD				0		0	100	
2.13 2.13.14 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Materai, dan Benda Pos Lainnya)	1	Paket	0	0	1		100	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	0	0	1		100	
2.13 2.13.14 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara.	1	Paket	0	0	1		100	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	0	1		100	
2.13 2.13.14 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				0		0	50	
2.13 2.13.14 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan.	8	Unit	0	0	4		50	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	0	0	4		50	
2.13 2.13.14 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				-		-	0	
2.13 2.13.14 2.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penataan Wilayah Desa				0		0	0	
2.13 2.13.14 2.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1	Desa	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Desa				-		-	0	
2.13 2.13.14 4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa				0		0	0	
2.13 2.13.14 4.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8	Dokumen	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 4.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	12	Dokumen	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 4.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12	Dokumen	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemsyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi				-		-	0	
2.13 2.13.14 5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat				0		0	0	
2.13 2.13.14 5.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.13 2.13.14 5.2.01.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		0		0		0			
2.13 2.13.14 5.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	1	Dokumen	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.15.15	DINAS PERHUBUNGAN								28,56	
2.15 2.15.15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja				62,64		56,12	35,25	
2.15 2.15.15 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu				100		58,33	58,33	
2.15 2.15.15 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	100	1	50	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.15 2.15.15 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.15 2.15.15 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.15 2.15.15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				52,08		17,86	10,42	
2.15 2.15.15 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	648	Orang	378	58,33	270	71,43	41,67	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	1	50	0	0	0	
2.15 2.15.15 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.15 2.15.15 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0	0	
2.15 2.15.15 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
2.15 2.15.15 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100		0	0	
2.15 2.15.15 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	445	Paket	445	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	4	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				44,44		88,89	44,44	
2.15 2.15.15 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.15 2.15.15 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	
2.15 2.15.15 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	2	50	2	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	1	50	1	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66,67		83,33	50	
2.15 2.15.15 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2	50	2	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	2	100	1	50	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Orang	4	50	4	100	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48,48		33,33	15,15	
2.15 2.15.15 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	10	45,45	10	100	45,45	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	Unit	2	100	0	0	0	,,,,,,
2.15 2.15.15 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9	Unit	0	0	0		0	,,,,,,
2.15 2.15.15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Juru Parkir yang memiliki izin				70,59		17,54	17,54	
2.15 2.15.15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				100		20	20	
2.15 2.15.15 2.2.01.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5	100	1	20	20	
2.15 2.15.15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100		26,06	26,06	
2.15 2.15.15 2.2.02.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Unit	10	100	5	50	50	,,,,,,
2.15 2.15.15 2.2.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	50	Unit	50	100	12	24	24	
2.15 2.15.15 2.2.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	24	Unit	24	100	1	4,17	4,17	,,,,,,
2.15 2.15.15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				100		100	100	
2.15 2.15.15 2.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	2	100	2	100	100	
2.15 2.15.15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				100		100	100	
2.15 2.15.15 2.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.15 2.15.15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				50		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	Unit	3	100	0	0	0	,,,,,,
2.15 2.15.15 2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	0	0	0		0	,,,,,,
2.15 2.15.15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				66,67		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.06.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 2.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 2.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	0	0		0	
2.15 2.15.15 2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				100		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.07.6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				100		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.08.7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.15 2.15.15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1				0		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.09.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	2	Unit	0	0	0		0	
2.15 2.15.15 2 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.11.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek	1	Dokumen	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.15 2.15.15 2 2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1	Persentase Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan				0		0	0	
2.15 2.15.15 2.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.15 2.15.15 2.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang	1	Dokumen	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16.16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								16,70	
2.16 2.16.16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				63,42		30,10	17,56	
2.16 2.16.16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100		0	0	
2.16 2.16.16 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.16 2.16.16 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.16 2.16.16 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.16 2.16.16 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.16 2.16.16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi keuangan Perangkat Daerah				54,17		25	14,58	
2.16 2.16.16 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan / Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	7	58,33	4	57,14	33,33	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	7	58,33	3	42,86	25	
2.16 2.16.16 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan /Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	0	0	0		0	
2.16 2.16.16 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	
2.16 2.16.16 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah				58,33		14,29	8,33	
2.16 2.16.16 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	12	Laporan	7	58,33	1	14,29	8,33	,,,,,,
2.16 2.16.16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran				58,33		36,32	21,18	
2.16 2.16.16 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	1	14,29	8,33	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	7	58,33	3	42,86	25	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang disediakan	12	Paket	7	58,33	1	14,29	8,33	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7	58,33	1	14,29	8,33	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Laporan	140	58,33	85,05	60,75	35,44	,,,,,,
2.16 2.16.16 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				58,33		171,43	100	
2.16 2.16.16 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	58,33	12	171,43	100	,,,,,,
2.16 2.16.16 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika				29,16		19,11	11,15	
2.16 2.16.16 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	108	Unit	63	58,33	24,08	38,22	22,3	,,,,,,
2.16 2.16.16 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	unit	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.16 2.16.16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo				79,16		35,72	31,25	
2.16 2.16.16 2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media				79,16		35,72	31,25	
2.16 2.16.16 2.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12	Dokumen	7	58,33	0	0	0	,,,,,,
2.16 2.16.16 2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1	100	1	100	100	,,,,,,
2.16 2.16.16 2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	7	58,33	3	42,86	25	,,,,,,
2.16 2.16.16 2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	layanan	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.16 2.16.16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi				65,58		9,29	5,33	
2.16 2.16.16 3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di				56		17,86	10	
2.16 2.16.16 3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50	Unit	28	56	5	17,86	10	,,,,,,
2.16 2.16.16 3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				67,98		7,14	4,16	
2.16 2.16.16 3.2.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	100	0	0	0	,,,,,,
2.16 2.16.16 3.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah Yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	38	Perangkat Daerah	21	55,26	0	0	0	,,,,,,
2.16 2.16.16 3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	12	Dokumen	7	58,33	1	14,29	8,33	,,,,,,
2.16 2.16.16 3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)	Jumlah Dokumen Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan SPBE	12	Dokumen	7	58,33	1	14,29	8,33	,,,,,,
2.21 2.16.16 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				55,26		-	0	
2.21 2.16.16 2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota				55,26		0	0	
2.21 2.16.16 2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38	Perangkat Daerah	21	55,26	0	0	0	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.17.17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								20,25	
2.17 2.17.17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				82,09		26,43	18,2	
2.17 2.17.17 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100		0	0	
2.17 2.17.17 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya dan Tersusunnya Data Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40,87		57,14	35,32	
2.17 2.17.17 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	Orang	135	64,29	135	100	64,29	////////
2.17 2.17.17 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	
2.17 2.17.17 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	////////
2.17 2.17.17 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum				58,33		14,29	8,33	
2.17 2.17.17 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7	58,33	1	14,29	8,33	
2.17 2.17.17 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100		0	0	
2.17 2.17.17 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah				86,9		16,33	8,33	
2.17 2.17.17 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	
2.17 2.17.17 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	100	0	0	0	////////
2.17 2.17.17 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	2	50	2	100	50	////////
2.17 2.17.17 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7	58,33	1	14,29	8,33	////////
2.17 2.17.17 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72,22		76,19	58,33	
2.17 2.17.17 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100	1	100	100	////////
2.17 2.17.17 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7	58,33	4	57,14	33,33	////////

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.17 2.17.17 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
2.17 2.17.17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				100		17,61	17,61	
2.17 2.17.17 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	100	3	50	50	
2.17 2.17.17 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142	Unit	142	100	4	2,82	2,82	
2.17 2.17.17 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	1	100	0	0	0	
2.17 2.17.17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam				50,00		-	0	
2.17 2.17.17 2 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam				100		0	0	
2.17 2.17.17 2.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	99	Usaha	99	100	0	0	0	
2.17 2.17.17 2 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Koperasi yang sudah memiliki ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha				0		0	0	
2.17 2.17.17 2.2.02.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah Koperasi yang sudah memiliki ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan	7	Koperasi	0	0	0		0	
2.17 2.17.17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi				100,00		100,00	100	
2.17 2.17.17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi				100		100	100	
2.17 2.17.17 3.2.01.4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70	Koperasi	70	100	70	100	100	
2.17 2.17.17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Koperasi sehat				100,00		-	0	
2.17 2.17.17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset				100		0	0	
2.17 2.17.17 4.2.01.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40	Unit Usaha	40	100	0	0	0	,,,,,,
2.17 2.17.17 4.2.01.3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		0		0		0			
2.17 2.17.17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan				100,00		93,33	93,33	
2.17 2.17.17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100		93,33	93,33	
2.17 2.17.17 5.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150	SDM	150	100	140	93,33	93,33	,,,,,,
2.17 2.17.17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran				-		-	0	
2.17 2.17.17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan				0		0	0	
2.17 2.17.17 6.2.01.5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	15	Koperasi	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.17 2.17.17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil				100,00		-	0	
2.17 2.17.17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan				100		0	0	
2.17 2.17.17 7.2.01.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Terdata	570	Unit	570	100	0	0	0	
2.17 2.17.17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro				-		-	13,64	
2.17 2.17.17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan				0		0	13,64	
2.17 2.17.17 8.2.01.6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	220	Unit Usaha	0	0	30		13,64	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.18.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								18,89	
2.18 2.18.18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator sasaran kota yang tercapai				46,13		22,40	20,6	
2.18 2.18.18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80		60	60	
2.18 2.18.18 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	1	100	100	*****
2.18 2.18.18 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	*****
2.18 2.18.18 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
2.18 2.18.18 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
2.18 2.18.18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu				39,41		10,72	6,18	
2.18 2.18.18 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/Bulan	49	57,65	21	42,86	24,71	*****
2.18 2.18.18 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	*****
2.18 2.18.18 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang disampaikan Tepat Waktu				0		0	0	
2.18 2.18.18 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				16,67		0	0	
2.18 2.18.18 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	100	0	0	0	*****
2.18 2.18.18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50		0	0	
2.18 2.18.18 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100	0	0	0	*****
2.18 2.18.18 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.18 2.18.18 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	1	100	0	0	0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.18 2.18.18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD yang terpenuhi				78,57		75	64,28	
2.18 2.18.18 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	4	57,14	2	50	28,57	
2.18 2.18.18 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	100	1	100	100	
2.18 2.18.18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial				100,00		-	0	
2.18 2.18.18 2 2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberian Keringanan Pajak dan Pemberian Kemudahan dalam Hal Pengurusan Izin Kepada				100		0	0	
2.18 2.18.18 2.2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.18 2.18.18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal				100,00		-	0	
2.18 2.18.18 3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal				100		0	0	
2.18 2.18.18 3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
2.18 2.18.18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio Pelayanan Perizinan								
2.18 2.18.18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Rasio Pelayanan Perizinan								
2.18 2.18.18 4.2.01.6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		0		0		0			
2.18 2.18.18 4.2.01.7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		0		0		0			
2.18 2.18.18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi								
2.18 2.18.18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi								
2.18 2.18.18 5.2.01.4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		0		0		0			
2.18 2.18.18 5.2.01.5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		0		0		0			
2.18 2.18.18 5.2.01.6	Pengawasan Penanaman Modal		0		0		0			
2.18 2.18.18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik								
2.18 2.18.18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha/Non Berusaha yang akurat								
2.18 2.18.18 6.2.01.2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.19.19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA								-	
2.19 2.19.19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang mendukung Kelancaran dan fungsi				-		-	0	
2.19 2.19.19 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		0			*****
2.19 2.19.19 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUmlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Oenyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokuemn	0	0	0		0	*****
		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JUmlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pembayaran gaji dan penatausahaan keuangan				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Orang	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	JUmlah Dokumen Haisl Penyediaan Adminostrasi Pelaksanaan TUGas ASNm	5	Dokuemn	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JUmlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meingkatnya Disiplin Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas tenaga				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya adm umum dinas				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JUmlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	paket	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUmlah Paket Bahan Rumah Tangga Yang Disediakan	10	Paket	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PJUmlah Dokumen penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	JUmlah Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	JUmlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan gedung kantor dibanding jumlah pegawai				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.19 2.19.19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan dinas				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUmlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	Laporan	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0		0		0			
2.19 2.19.19 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris yang layak pakai				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	3	Unit	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15	Unit	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUmlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Gedung	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 1 2.13	Penataan Organisasi	Persentase dokumen Laporan kinerja pemerintah daerah				0		0	0	
2.19 2.19.19 1.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				-		-	0	
2.19 2.19.19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap				0		0	0	
2.19 2.19.19 2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kab/Kota Dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Jambore	20	Orang	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 2.2.01.4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana	umlah Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,	100	Orang	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 2.2.01.8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah eningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2	Dokumen	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 2 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota								
2.19 2.19.19 2.2.02.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		0		0		0			
2.19 2.19.19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				-		-	0	
2.19 2.19.19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi				0		0	0	
2.19 2.19.19 3.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang tersedia dan termanfaat	25	Paket	0	0	0		0	*****
2.19 2.19.19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0	0	
2.19 2.19.19 3.2.02.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraann	50	Orang / Peserta	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				0		0	0	
2.19 2.19.19 3.2.05.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	4	Dokumen	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 3.2.05.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3	Dokumen	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.19 2.19.19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				-		-	0	
2.19 2.19.19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				0		0	0	
2.19 2.19.19 4.2.01.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1	Laporan	0	0	0		0	
2.19 2.19.19 4.2.01.7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan Termanfaatkan	1	Unit	0	0	0		0	
3.26 2.19.19 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				-		-	0	
3.26 2.19.19 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	meningkatnya Daya Tarik Pariwisata				0		0	0	
3.26 2.19.19 2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	JUmlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata kabupaten / kota	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.26 2.19.19 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata								
3.26 2.19.19 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis								
3.26 2.19.19 3.2.01.6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		0		0		0			
3.26 2.19.19 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				-		-	0	
3.26 2.19.19 5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif				0		0	0	
3.26 2.19.19 5.2.01.9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	46	Orang	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.23.20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								30,58	
2.23 2.23.20 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				-		-	61,17	
2.23 2.23.20 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD				0		0	100	
2.23 2.23.20 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	0	3		100	////////
2.23 2.23.20 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		0			////////
2.23 2.23.20 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0		0		0			////////
2.23 2.23.20 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	0	0	1		100	////////
2.23 2.23.20 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	0	0	1		100	////////
2.23 2.23.20 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian keuangan				0		0	20,56	
2.23 2.23.20 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	31	OB	0	0	10		32,26	////////
2.23 2.23.20 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	0	0	6		50	////////
2.23 2.23.20 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	0	0	0		0	////////
2.23 2.23.20 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	laporan	0	0	0		0	////////
2.23 2.23.20 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah				0		0	600	
2.23 2.23.20 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	0	0	6		600	////////
2.23 2.23.20 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah				0		0	22,29	
2.23 2.23.20 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	0	0	0		0	////////
2.23 2.23.20 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	0	0	0		0	////////
2.23 2.23.20 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	0	0	0,15		15	////////
2.23 2.23.20 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	0	0	0,22		22	////////
2.23 2.23.20 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848	dokumen	0	0	462		25	////////
2.23 2.23.20 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	0	0	0,24		24	////////
2.23 2.23.20 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	0	0	0,7		70	////////
2.23 2.23.20 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	26,75	
2.23 2.23.20 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	0	0	0,25		25	////////
2.23 2.23.20 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	0	0	0,29		29	////////
2.23 2.23.20 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	laporan	0	0	1		20	////////
2.23 2.23.20 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	0	0	0,33		33	////////
2.23 2.23.20 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	19,64	
2.23 2.23.20 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit	0	0	1		14,29	////////
2.23 2.23.20 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	0	1		25	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
1	2	3	4	5	VOL	%	VOL	%	10=8/4*100	
					6	7=6/4*100	8	9=8/6*100		
2.23 2.23.20 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Gemar Membaca di Masyarakat				-		-	0	
2.23 2.23.20 2 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota				0		0	0	
2.23 2.23.20 2.2.01.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :	1	layanan	0	0	0		0	
2.23 2.23.20 2.2.01.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	10	perpustakaan	0	0	0		0	
2.23 2.23.20 2.2.01.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	15	perpustakaan	0	0	0		0	
2.23 2.23.20 2.2.01.5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	9	perpustakaan	0	0	0		0	*****
2.23 2.23.20 2.2.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	layanan	0	0	0		0	*****
2.23 2.23.20 2.2.01.8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500	eksemplar	0	0	0		0	*****
2.23 2.23.20 2.2.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	600	eksemplar	0	0	0		0	*****
2.23 2.23.20 2 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota				0		0	0	
2.23 2.23.20 2.2.02.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2	lokus	0	0	0		0	*****
2.23 2.23.20 2.2.02.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3	perpustakaan	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola				-		-	0	
2.24 2.23.20 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				0		0	0	
2.24 2.23.20 2.2.01.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1	berkas	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 2.2.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1	berkas	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 2.2.01.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1	laporan	0	0	0		0	*****
2.24 2.23.20 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				0		0	0	
2.24 2.23.20 2.2.02.1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1	arsip	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 2.2.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1	arsip	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 2 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					0		0	0	
2.24 2.23.20 2.2.03.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	26	pengguna	0	0	0		0	*****
2.24 2.23.20 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi				-		-	0	
2.24 2.23.20 3 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip dilingkungan daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh)				0		0	0	
2.24 2.23.20 3.2.01.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	20	arsip	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 3.2.01.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1	berkas	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 3 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan	Terselamatkannya Arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan				0		0	0	
2.24 2.23.20 3.2.03.3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1	arsip	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 3.2.03.4	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1	arsip	0	0	0		0	
2.24 2.23.20 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/kota				0		0	0	
2.24 2.23.20 3.2.04.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1	arsip	0	0	0		0	*****
2.24 2.23.20 3.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	1	arsip	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI VOL	% 7=6/4*100	REALISASI SD. BULAN JULI VOL	% 9=8/6*100	CAPAIAN 10=8/4*100	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
3.25.38	DINAS PERIKANAN								37,50	
3.25 3.25.38 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				-		-	47,37	
3.25 3.25.38 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu				0		0	20	
3.25 3.25.38 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	1		100	
3.25 3.25.38 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.25 3.25.38 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.25 3.25.38 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	0	0	0		0	
3.25 3.25.38 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	
3.25 3.25.38 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu				0		0	25	
3.25 3.25.38 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang	0	0	21		100	*****
3.25 3.25.38 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
3.25 3.25.38 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	0	0	0		0	
3.25 3.25.38 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu				0		0	0	
3.25 3.25.38 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				0		0	0	
3.25 3.25.38 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				0		0	100	
3.25 3.25.38 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1	Paket	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	50	
3.25 3.25.38 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1	Laporan	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0	100	
3.25 3.25.38 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	0	0	1		100	*****
3.25 3.25.38 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tingkat Realisasi Produksi Perikanan				-		-	0	
3.25 3.25.38 4 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0		0	0	
3.25 3.25.38 4.2.02.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	10	Kelompok	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				0		0	0	
3.25 3.25.38 4.2.04.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Unit	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 4.2.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Realisasi Angka Konsumsi Ikan				-		-	0	
3.25 3.25.38 6 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	0	
3.25 3.25.38 6.2.03.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,4	Ton	0	0	0		0	*****
3.25 3.25.38 6.2.03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	Pelaku Usaha	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
3.27.21	DINAS PERTANIAN								40,34	
3.27 3.27.21 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				23,36		34,41	38,93	
3.27 3.27.21 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Prabumulih				10		20	30	
3.27 3.27.21 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1	50	1	100	50	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	0	0	1		100	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	
3.27 3.27.21 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21,67		54,29	48,33	
3.27 3.27.21 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang	35	50	70	200	100	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	1		100	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
3.27 3.27.21 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu				0		0	0	
3.27 3.27.21 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
3.27 3.27.21 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				49,6		0	0	
3.27 3.27.21 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125	Paket	62	49,6	0	0	0	,,,,,,
3.27 3.27.21 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				57,04		74,74	42,38	
3.27 3.27.21 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
3.27 3.27.21 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	74	49,33	70	94,59	46,67	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
3.27 3.27.21 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja				0		0	50	
3.27 3.27.21 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	Unit	0	0	0		0	
3.27 3.27.21 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	0	0	3		100	
3.27 3.27.21 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang pada Dinas Pertanian Kota Prabumulih				0		0	41,67	
3.27 3.27.21 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	5		41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	0	5		41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	0	5		41,67	
3.27 3.27.21 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	0	5		41,67	,,,,,,
3.27 3.27.21 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				0		0	57,14	
3.27 3.27.21 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	Unit	0	0	20		57,14	,,,,,,
3.27 3.27.21 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan				50,00		-	50	
3.27 3.27.21 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian				0		0	100	
3.27 3.27.21 3.2.01.5	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	7	Ha	0	0	7		100	
3.27 3.27.21 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian				100		0	0	
3.27 3.27.21 3.2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	1	100	0	0	0	
3.27 3.27.21 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				25,00		16,66	58,34	
3.27 3.27.21 4 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam				25		16,66	58,34	
3.27 3.27.21 4.2.01.3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	6	Kecamatan	3	50	1	33,33	16,67	
3.27 3.27.21 4.2.01.8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu)	1	Laporan	0	0	1		100	
3.27 3.27.21 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani				12,50		-	35,72	
3.27 3.27.21 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				12,5		0	35,72	
3.27 3.27.21 7.2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DINAS PERTANIAN)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	6	Unit	0	0	3		50	
3.27 3.27.21 7.2.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	7	Unt	0	0	3		42,86	
3.27 3.27.21 7.2.01.6	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	10	Orang	5	50	0	0	0	
3.27 3.27.21 7.2.01.7	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	6	Unit	0	0	3		50	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
3.31.30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								13,35	
3.31 3.31.30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				22,97		12,33	14,77	
3.31 3.31.30 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				0		0	20	
3.31 3.31.30 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	1		100	,,,,,,
3.31 3.31.30 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
3.31 3.31.30 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
3.31 3.31.30 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				8,33		3,46	7,56	
3.31 3.31.30 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/bulan	13	50	2,7	20,77	10,38	,,,,,,
3.31 3.31.30 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	0	0	0,35		35	,,,,,,
3.31 3.31.30 1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
3.31 3.31.30 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				25		0	10,25	
3.31 3.31.30 1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
3.31 3.31.30 1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0,41		41	,,,,,,
3.31 3.31.30 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				58,33		56,07	32,71	
3.31 3.31.30 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	2,1	30	17,5	
3.31 3.31.30 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	0,1	1,43	0,83	
3.31 3.31.30 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Paket	7	58,33	5,9	84,29	49,17	,,,,,,
3.31 3.31.30 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7	58,33	7,6	108,57	63,33	
3.31 3.31.30 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				40		0	0	
3.31 3.31.30 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	4	40	0	0	0	
3.31 3.31.30 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				29,16		19,28	11,25	
3.31 3.31.30 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7	58,33	2,7	38,57	22,5	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					TARGET VOL	%	REALISASI VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
3.31 3.31.30 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				46,67		0	0	
3.31 3.31.30 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	7	46,67	0	0	0	
3.30 3.31.30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang memenuhi standard				-		-	12	
3.30 3.31.30 3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0		0	12	
3.30 3.31.30 3.2.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	0	0	0,12		12	,,,,,,
3.30 3.31.30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Minimal 8 Kali dalam Sebulan				-		-	6,33	
3.30 3.31.30 4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0	13	
3.30 3.31.30 4.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	1	Laporan	0	0	0,13		13	
3.30 3.31.30 4 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalnya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				0		0	6	
3.30 3.31.30 4.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	1	Laporan	0	0	0,06		6	,,,,,,
3.30 3.31.30 4 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terawasnya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0		0	0	
3.30 3.31.30 4.2.03.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	Laporan	0	0	0		0	
3.30 3.31.30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku				50,00		38,34	19,16	
3.30 3.31.30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				50		38,34	19,16	
3.30 3.31.30 6.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300	UTTP	150	50	115	76,67	38,33	,,,,,,
3.30 3.31.30 6.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200	UTTP	100	50	0	0	0	,,,,,,
3.30 3.31.30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina				50,00		-	0	
3.30 3.31.30 7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				50		0	0	
3.30 3.31.30 7.2.01.6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,	100	UMKM	50	50	0	0	0	
3.31 3.31.30 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah				-		-	6	
3.31 3.31.30 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri				0		0	6	
3.31 3.31.30 2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	0	0	0,12		12	,,,,,,
3.31 3.31.30 2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
3.31 3.31.30 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin usaha yang dikendalikan				-		-	0	
3.31 3.31.30 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan				0		0	0	
3.31 3.31.30 3.2.01.4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam	1	Dokumen	0	0	0		0	
3.31 3.31.30 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang memenuhi standard				-		-	33	
3.31 3.31.30 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0	33	
3.31 3.31.30 4.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	1	Dokumen	0	0	0,33		33	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
4.1.22	SEKRETARIAT DAERAH								19,37	
4.1 4.1.22 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				46,46		33,06	27,05	
4.1 4.1.22 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD Sekretariat Daerah				0		0	0	
4.1 4.1.22 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dokumen	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	1	dokumen	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretariat daerah				0		0	0	
4.1 4.1.22 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	7	orang	0	0	0		0	
4.1 4.1.22 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	dokumen	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/	1	DOKUMEN	0	0	0		0	
4.1 4.1.22 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan aspek teknis				25		25	25	
4.1 4.1.22 1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	2	dokumen	2	100	2	100	100	*****
4.1 4.1.22 1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1	LAPORAN	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milim daerah pada SKPD	1	laporan	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	laporan	0	0	0		0	
4.1 4.1.22 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Yang Mendukung Kedisiplinan Pegawai				30,7		29,29	26,97	
4.1 4.1.22 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	152	paket	140	92,11	123	87,86	80,92	*****
4.1 4.1.22 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	orang	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	orang	0	0	0		0	
4.1 4.1.22 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				55,08		38,02	28,74	
4.1 4.1.22 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	43	paket	33	76,74	23	69,7	53,49	*****
4.1 4.1.22 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	paket	5	83,33	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	28	paket	21	75	14	66,67	50	*****
4.1 4.1.22 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	dokumen	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
4.1 4.1.22 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	145	paket	109	75,17	73	66,97	50,34	*****
4.1 4.1.22 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	150	laporan	113	75,33	71	62,83	47,33	*****
4.1 4.1.22 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	laporan	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				100		56,04	56,04	
4.1 4.1.22 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas atau operasional atau lapangan yang disediakan	7	unit	7	100	7	100	100	*****
4.1 4.1.22 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	3	unit	3	100	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit dan peralatan mesin lainnya yang disediakan	29	unit	29	100	7	24,14	24,14	*****
4.1 4.1.22 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	33	unit	33	100	33	100	100	
4.1 4.1.22 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				64,45		63,19	39,83	
4.1 4.1.22 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	37	laporan	22	59,46	19	86,36	51,35	*****
4.1 4.1.22 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	135	laporan	102	75,56	47	46,08	34,81	*****
4.1 4.1.22 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	7	58,33	4	57,14	33,33	*****
4.1 4.1.22 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				87,59		59,21	51,34	
4.1 4.1.22 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	unit	2	100	1	50	50	*****
4.1 4.1.22 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	125	unit	94	75,2	60	63,83	48	*****
4.1 4.1.22 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	169	unit	127	75,15	80	62,99	47,34	*****
4.1 4.1.22 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	5	100	3	60	60	*****
4.1 4.1.22 1 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Untuk Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				50		20,83	20,83	
4.1 4.1.22 1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	orang	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	12	paket	12	100	6	50	50	*****
4.1 4.1.22 1.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	6	orang	6	100	2	33,33	33,33	*****
4.1 4.1.22 1.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	orang	0	0	0		0	*****
4.1 4.1.22 1 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah				76,36		100	76,36	
4.1 4.1.22 1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	55	paket	29	52,73	29	100	52,73	*****
4.1 4.1.22 1.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	4	paket	4	100	4	100	100	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
1	2	3	4	5	VOL	%	VOL	%	10=8/4*100	
4.1 4.1.22 1 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi				33,33		33,33	16,67	
4.1 4.1.22 1.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	4	dokumen	2	50	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	4	dokumen	2	50	2	100	50	*****
4.1 4.1.22 1 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				38,89		0	0	
4.1 4.1.22 1.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	3	laporan	1	33,33	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 1.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	4	laporan	2	50	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	3	laporan	1	33,33	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)				-		-	0	
4.1 4.1.22 2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan				0		0	0	
4.1 4.1.22 2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				0		0	0	
4.1 4.1.22 2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi,	2	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan	3	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi hukum				0		0	0	
4.1 4.1.22 2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun	10	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	6	kasus	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	20	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Dalam negeri dan luar negeri				0		0	0	
4.1 4.1.22 2.2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	24	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.04.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 2.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	Laporan	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pelayanan Pembangunan				20,22		6,83	9,97	
4.1 4.1.22 3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian				0		0	0	
4.1 4.1.22 3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD	2	Dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3.2.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	Laporan	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Pembangunan Kota Prabumulih				30,86		10,67	31,54	
4.1 4.1.22 3.2.02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	5	dokumen	0	0	2	0	40	*****
4.1 4.1.22 3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	27	laporan	25	92,59	8	32	29,63	*****
4.1 4.1.22 3.2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	4	laporan	0	0	1	0	25	*****
4.1 4.1.22 3 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP / UKPBJ dengan tuntas				50		16,67	8,33	
4.1 4.1.22 3.2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2	dokumen	1	50	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3.2.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2	dokumen	1	50	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3.2.03.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100	orang	50	50	25	50	25	*****
4.1 4.1.22 3 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam				0		0	0	
4.1 4.1.22 3.2.04.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan.	4	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3.2.04.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral lingkungan hidup,	4	dokumen	0	0	0	0	0	*****
4.1 4.1.22 3.2.04.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan	6	dokumen	0	0	0	0	0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
4.2.23	SEKRETARIAT DPRD								76,57	
4.2.4.2.23.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				-		-	123,31	
4.2.4.2.23.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0	500	
4.2.4.2.23.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0	10		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokume	0	0	5		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	5		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	0	0	5		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	5		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun				0		0	341,67	
4.2.4.2.23.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	744	Orang/Bulan	0	0	372		50	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	60		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	0	0	60		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	1	Laporan	0	0	5		500	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan	1	Laporan	0	0	5		500	,,,,,,
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	744	Orang/Bulan	0	0	0		0	
4.2.4.2.23.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang disampaikan Tepat Waktu				0		0	0	
4.2.4.2.23.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kepegawaian yang diakomodir				0		0	0	
4.2.4.2.23.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40	Unit	0	0	0		0	
4.2.4.2.23.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	Orang	0	0	0		0	
4.2.4.2.23.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminitrasi Umum Perkantoran				0		0	16,67	
4.2.4.2.23.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	0	2		16,67	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	34	Unit	0	0	0		0	
4.2.4.2.23.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	107	Unit	0	0	0		0	
4.2.4.2.23.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	0	0	4		33,33	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	0	0	0		0	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang sediakan	12	Dokumen	0	0	5		41,67	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	0	0	2		16,67	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
4.2.4.2.23.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	Laporan	0	0	40		41,67	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
4.2 4.2.23 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang disediakan				0		0	0	
4.2 4.2.23 1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	Unit	0	0	0		0	
4.2 4.2.23 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	Unit	0	0	0		0	
4.2 4.2.23 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	62	Unit	0	0	0		0	
4.2 4.2.23 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah				0		0	58,33	
4.2 4.2.23 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	4		33,33	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laopran Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	0	0	5		41,67	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	Laporan	0	0	2		100	,,,,,,
4.2 4.2.23 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				0		0	25,83	
4.2 4.2.23 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	0	0	0		0	
4.2 4.2.23 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	Unit	0	0	2		12,5	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10	Unit	0	0	0		0	
4.2 4.2.23 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	60	Unit	0	0	10		16,67	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	1		100	,,,,,,
4.2 4.2.23 1 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan yang Tersedia				0		0	13,89	
4.2 4.2.23 1.2.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	300	Orang/Bulan	0	0	125		41,67	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	12	Paket	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	125	Orang	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 1 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Keanggotaan DPRD yang tersedia				0		0	3,33	
4.2 4.2.23 1.2.16.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.16.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	10	Laporan	0	0	1		10	,,,,,,
4.2 4.2.23 1.2.16.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda				-		-	16,67	
4.2 4.2.23 2 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk				0		0	0	
4.2 4.2.23 2.2.01.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 2.2.01.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 2.2.01.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	6	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
4.2 4.2.23 2.2.01.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
1	2	3	4	5	VOL	%	VOL	%	10=8/4*100	
4.2 4.2.23 2 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Anggaran yang terlaksana				0		0	0	
4.2 4.2.23 2.2.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.02.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.02.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.02.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.02.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.02.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan yang terlaksana				0		0	33,33	
4.2 4.2.23 2.2.03.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	Laporan	0	0	2		100	////////
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Infrastruktur	1	Laporan	0	0	0		0	
4.2 4.2.23 2.2.03.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.03.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Laporan	0	0	1		100	////////
4.2 4.2.23 2.2.03.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	6	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.03.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	3	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.03.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.03.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.03.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	0	0	1		100	////////
4.2 4.2.23 2 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Meningkat				0		0	14,58	
4.2 4.2.23 2.2.04.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	0	0	1		16,67	////////
4.2 4.2.23 2.2.04.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84	Orang/Bulan	0	0	28		33,33	////////
4.2 4.2.23 2.2.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	0	0	1		8,33	////////
4.2 4.2.23 2.2.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.04.8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		0		0		0			
4.2 4.2.23 2 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana				0		0	22,22	
4.2 4.2.23 2.2.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	10	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.05.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	3	Dokumen	0	0	1		33,33	////////
4.2 4.2.23 2.2.05.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	0	0	1		33,33	////////
4.2 4.2.23 2 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik yang terlaksana				0		0	0	
4.2 4.2.23 2.2.06.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dokumen	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.06.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yang terlaksana				0		0	27,12	
4.2 4.2.23 2.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	52	Dokumen	0	0	20		38,46	////////
4.2 4.2.23 2.2.08.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi,alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	Laporan	0	0	0		0	////////
4.2 4.2.23 2.2.08.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	Dokumen	0	0	7		70	////////
4.2 4.2.23 2.2.08.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5	Dokumen	0	0	0		0	////////

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.1.25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4,96	
5.1 5.1.25 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				20,07		9,35	7,08	
5.1 5.1.25 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu				20		20	20	
5.1 5.1.25 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	0		0	Belum bisa dilakukan di awal tahun karena menunggu penetapan DPA APBD,
5.1 5.1.25 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
5.1 5.1.25 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu				39,58		10,72	6,25	
5.1 5.1.25 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480	Orang	280	58,33	120	42,86	25	*****
5.1 5.1.25 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	*****
5.1 5.1.25 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu				0		0	0	
5.1 5.1.25 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	
5.1 5.1.25 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				50		0	0	
5.1 5.1.25 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100	0	0	0	
5.1 5.1.25 1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	0	0	0		0	
5.1 5.1.25 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				0		0	0	
5.1 5.1.25 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1	Paket	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	0	
5.1 5.1.25 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1	Laporan	0	0	0		0	,,, Terjadi keneikan harga pasara, sehingga tidak bisa dibelikan,,,
5.1 5.1.25 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.1 5.1.25 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				51,66		36,11	18,89	
5.1 5.1.25 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional Kantor yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	8	53,33	4	50	26,67	Kendaraan yang baru dipelihara 4 kendaraan, dari 15 kendaraan,
5.1 5.1.25 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	18	50	4	22,22	11,11	*****
5.1 5.1.25 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator sasaran kota yang tercapai				38,89		16,67	16,67	
5.1 5.1.25 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan				77,78		33,33	33,33	
5.1 5.1.25 2.2.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi publik	1	Berita Acara	1	100	1	100	100	
5.1 5.1.25 2.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	1	100	0	0	0	*****
5.1 5.1.25 2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	1	33,33	0	0	0	*****
5.1 5.1.25 2 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pembangunan Daerah				0		0	0	
5.1 5.1.25 2.2.02.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	300	Orang	0	0	0		0	
5.1 5.1.25 2 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tersedia tepat waktu				0		0	0	
5.1 5.1.25 2.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	Laporan	0	0	0		0	
5.1 5.1.25 2 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0		0	0	
5.1 5.1.25 2.2.04.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	0	0	0		0	
5.1 5.1.25 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Sasaran OPD yang Tercapai				-		-	0	
5.1 5.1.25 3 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				0		0	0	
5.1 5.1.25 3.2.01.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian capaian kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam				0		0	0	
5.1 5.1.25 3.2.02.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.1 5.1.25 3.2.02.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.02.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.02.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumberdaya Alam SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.02.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.02.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumberdaya	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.02.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumberdaya Alam (SDA)	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian capaian kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan				0		0	0	
5.1 5.1.25 3.2.03.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****
5.1 5.1.25 3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.2.26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								17,44	
5.2.5.2.26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				-		-	17,44	
5.2.5.2.26 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0	22,09	
5.2.5.2.26 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,1E+07	Dokumen	0	0	13566100		22,09	////////
5.2.5.2.26 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan				0		0	16,67	
5.2.5.2.26 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,7E+09	Orang/bulan	0	0	1,732E+09		100	////////
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4E+07	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,3E+08	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,1E+07	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1E+07	Dokumen	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3,6E+07	Laporan	0	0	0		0	
5.2.5.2.26 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah								
5.2.5.2.26 1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.2.5.2.26 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0		0		0			
5.2.5.2.26 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0		0		0			
5.2.5.2.26 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran								
5.2.5.2.26 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.8	Facilitasi Kunjungan Tamu		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		0			////////
5.2.5.2.26 1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0		0		0			////////

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.2 5.2.26 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda								
5.2 5.2.26 1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0		0		0			
5.2 5.2.26 1.2.07.5	Pengadaan Mebel		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.2 5.2.26 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
5.2 5.2.26 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)								
5.2 5.2.26 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
5.2 5.2.26 2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
5.2 5.2.26 2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		0		0		0			/////

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.2 5.2.26 2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
5.2 5.2.26 2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		0		0		0			
5.2 5.2.26 2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5.2 5.2.26 2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								
5.2 5.2.26 2.2.05.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Akurasi Data BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemda								
5.2 5.2.26 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5.2 5.2.26 3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////
5.2 5.2.26 3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		0		0		0			/////

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.2.27	BADAN PENDAPATAN DAERAH								515,89	
5.2 5.2.27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran				-		-	786,11	
5.2 5.2.27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.2 5.2.27 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		0		0			*****
5.2 5.2.27 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		0			*****
5.2 5.2.27 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0		0		0			*****
5.2 5.2.27 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0		0		0			*****
5.2 5.2.27 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		0		0			*****
5.2 5.2.27 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Disampaikan Tepat Waktu				0		0	1152,08	
5.2 5.2.27 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	12	bulan	0	0	301		2508,33	*****
5.2 5.2.27 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	0	0	14		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	7		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	0	0	7		700	*****
5.2 5.2.27 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah				0		0	700	
5.2 5.2.27 1.2.04.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2	Laporan	0	0	14		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Laporan	0	0	14		700	*****
5.2 5.2.27 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur				0		0	700	
5.2 5.2.27 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	7		700	
5.2 5.2.27 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	orang	0	0	175		700	
5.2 5.2.27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				0		0	700	
5.2 5.2.27 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	0	28		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	0	0	28		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	0	28		700	
5.2 5.2.27 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	0	0	28		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000	Dokumen	0	0	28000		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	0	0	28		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	0	84		700	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.2 5.2.27 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur				0		0	700	
5.2 5.2.27 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	unit	0	0	63		700	
5.2 5.2.27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	700	
5.2 5.2.27 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Laporan	0	0	3500		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	0	84		700	*****
5.2 5.2.27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				0		0	700	
5.2 5.2.27 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	0	0	84		700	*****
5.2 5.2.27 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	0	7		700	
5.2 5.2.27 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	0	0	63		700	*****
5.2 5.2.27 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu dan Benar				-		-	0	
5.2 5.2.27 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan Dana				0		0	0	
5.2 5.2.27 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan	3	dokumen	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Capaian Penerimaan 9 Pajak dan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB				-		-	0	
5.2 5.2.27 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				0		0	0	
5.2 5.2.27 4.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	Laporan	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000	Obyek pajak	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	Layanan	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2	Dokumen	0	0	0		0	*****
5.2 5.2.27 4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dokumen	0	0	0		0	*****

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.3.28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								2.195,25	
5.3.5.3.28.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				80,72		2.780,76	2610,49	
5.3.5.3.28.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun				75		7500	7500	
5.3.5.3.28.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	300	30000	30000	
5.3.5.3.28.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Dokumen	0	0	0		0	
5.3.5.3.28.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun				65,17		3366,79	2741,39	
5.3.5.3.28.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	9	64,29	744,23	8269,22	5315,93	
5.3.5.3.28.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN, Tersedianya Gaji PHL	13	Bulan	8	61,54	36,14	451,75	278	
5.3.5.3.28.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	100	81,13	8113	8113	
5.3.5.3.28.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	0	0	0		0	
5.3.5.3.28.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				58,33		1419	827,75	
5.3.5.3.28.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Tersedianya Jasa Pengelola Barang Daerah	12	Dokumen	7	58,33	99,33	1419	827,75	
5.3.5.3.28.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100		0	0	
5.3.5.3.28.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	Paket	55	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu				88,61		1651,89	1622,08	
5.3.5.3.28.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Paket	6	60	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	1	100	130,23	13023	13023	
5.3.5.3.28.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	100	10,52	1052	1052	
5.3.5.3.28.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	Dokumen	3	75	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	Paket	1	100	0	0	0	
5.3.5.3.28.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	5	100	3,83	76,6	76,6	
5.3.5.3.28.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	5	62,5	35,77	715,4	447,12	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.3 5.3.28 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100		1131,17	1131,17	
5.3 5.3.28 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	Laporan	2	100	30,01	1500,5	1500,5	
5.3 5.3.28 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	1	100	18,93	1893	1893	
5.3 5.3.28 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55,56		224,8	124,89	
5.3 5.3.28 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	unit	15	55,56	33,72	224,8	124,89	
5.3 5.3.28 1.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		0		0		0			
5.3 5.3.28 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit				96,43		1.664,41	1483,41	
5.3 5.3.28 2 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan ASN				90		1013,6	506,8	
5.3 5.3.28 2.2.01.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen	1	50	50,68	5068	2534	
5.3 5.3.28 2.2.01.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	2	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 2.2.01.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	1	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 2.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 2.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3	Dokumen	3	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 2 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang dimutasi dan dipromosi				100		1196,17	1196,17	
5.3 5.3.28 2.2.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	3	Dokumen	3	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 2.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dokumen	2	100	48,13	2406,5	2406,5	
5.3 5.3.28 2.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	Dokumen	3	100	35,46	1182	1182	
5.3 5.3.28 2 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi				100		2422,54	2422,54	
5.3 5.3.28 2.2.03.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	120	Orang	120	100	189,2	157,67	157,67	
5.3 5.3.28 2.2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Orang	5	100	0	0	0	
5.3 5.3.28 2.2.03.5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1	Dokumen	1	100	94,98	9498	9498	
5.3 5.3.28 2.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	500	Orang	500	100	172,54	34,51	34,51	
5.3 5.3.28 2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Evaluasi Kinerja dan Kualitas Kedisiplinan Aparatur				100		2477,5	2477,5	
5.3 5.3.28 2.2.04.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	1	100	49,55	4955	4955	
5.3 5.3.28 2.2.04.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	300	orang	300	100	0	0	0	
5.4 5.3.28 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-								
5.4 5.3.28 2 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
5.4 5.3.28 2.2.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
5.5.29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.5 5.5.29 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-								
5.5 5.5.29 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		0		0			
5.5 5.5.29 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0		0		0			
5.5 5.5.29 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0		0		0			
5.5 5.5.29 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material		0		0		0			
5.5 5.5.29 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0		0			
5.5 5.5.29 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0		0		0			
5.5 5.5.29 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.5 5.5.29 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-								
5.5 5.5.29 2 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									
5.5 5.5.29 2.2.01.3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		0		0		0			
5.5 5.5.29 2.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		0		0		0			
5.5 5.5.29 2 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									
5.5 5.5.29 2.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		0		0		0			
5.5 5.5.29 2 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									
5.5 5.5.29 2.2.03.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0		0		0			
5.5 5.5.29 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi									
5.5 5.5.29 2.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi		0		0		0			////////
5.5 5.5.29 2.2.04.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		0		0		0			
5.5 5.5.29 2.2.04.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
6.1.24	INSPEKTORAT DAERAH								18,03	
6.1 6.1.24 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				43,56		30,27	28,12	
6.1 6.1.24 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				40		40	30	
6.1 6.1.24 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	1	50	0	0	0	tidak ada isian realisasi,
6.1 6.1.24 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordniasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0		0	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan Laporan	1	Laporan	1	100	1	100	100	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	2	50	2	100	50	,,,,,,
6.1 6.1.24 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan Keuangan disampaikan tepat waktu				25		0	22,6	
6.1 6.1.24 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52	Orang	0	0	21		40,38	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	0	0	0,5		50	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi keuangan	1	Laporan	1	100	0	0	0	,,,,,,
6.1 6.1.24 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan BMD yang disampaikan tepat waktu				0		0	50	
6.1 6.1.24 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0	0,5		50	,,,,,,
6.1 6.1.24 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				50		7,69	3,85	
6.1 6.1.24 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52	Orang	52	100	0	0	0	
6.1 6.1.24 1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan hasil Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	1	Laporan	0	0	0		0	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	52	Orang	26	50	6	23,08	11,54	,,,,,,
6.1 6.1.24 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				58,33		54,29	31,67	
6.1 6.1.24 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12	Dokumen	7	58,33	4	57,14	33,33	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12	Paket	7	58,33	0	0	0	,,,,,,
6.1 6.1.24 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	,,,,,,

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
6.1 6.1.24 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				100		100	100	
6.1 6.1.24 1 2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	6	100	6	100	100	
6.1 6.1.24 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58,33		42,86	25	
6.1 6.1.24 1 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	7	58,33	3	42,86	25	*****
6.1 6.1.24 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				29,16		14,28	16,67	
6.1 6.1.24 1 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	6	Unit	0	0	1		16,67	*****
6.1 6.1.24 1 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12	Unit	7	58,33	2	28,57	16,67	*****
6.1 6.1.24 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan				4,96		-	6,67	
6.1 6.1.24 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan pengawasan internal				6,2		0	8,33	
6.1 6.1.24 2 2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja PD	1	Laporan	0	0	0		0	*****
		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SPIP	1	Laporan	0	0	0		0	
		Jumlah laporan hasil Pengawasan kinerja pemerintah daerah	4	Laporan	0	0	0		0	
6.1 6.1.24 2 2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan keuangan pemerintah daerah	250	Laporan	124	49,6	0	0	0	*****
6.1 6.1.24 2 2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil reviu laporan kinerja	4	Laporan	0	0	0		0	
		Jumlah Laporan atas Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (REVIU LAKIP)	1	Laporan	0	0	0		0	
6.1 6.1.24 2 2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	3	Laporan	0	0	1		33,33	*****
6.1 6.1.24 2 2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	3	Dokumen	0	0	1		33,33	*****
6.1 6.1.24 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketersediaan dokumen kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu				0		0	0	
6.1 6.1.24 2 2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	1	Laporan	0	0	0		0	*****
6.1 6.1.24 2 2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	1	Laporan	0	0	0		0	*****
6.1 6.1.24 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah				27,34		-	0	
6.1 6.1.24 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase ketersediaan dokumen kegiatan Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas				58,33		0	0	
6.1 6.1.24 3 2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan	12	Rekomendasi	7	58,33	0	0	0	*****
6.1 6.1.24 3 2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan	12	Rekomendasi	7	58,33	0	0	0	*****
6.1 6.1.24 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketersediaan dokumen kegiatan pendampingan dan asistensi				11,84		0	0	
6.1 6.1.24 3 2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	0	0	0		0	*****
6.1 6.1.24 3 2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	Laporan	0	0	0		0	
6.1 6.1.24 3 2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan	1	Dokumen	0	0	0		0	*****
6.1 6.1.24 3 2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	38	Perangkat Daerah	18	47,37	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
7.1.32	KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN								28,23	
7.1 7.1.32 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				58,96		56,72	30,95	
7.1 7.1.32 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58,33		71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348	Orang	203	58,33	145	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				58,33		71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100		0	0	
7.1 7.1.32 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105	Paket	105	100	0	0	0	
7.1 7.1.32 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				54,59		65,31	36,23	
7.1 7.1.32 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2	33,33	1	50	16,67	
7.1 7.1.32 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	Paket	4	57,14	2	50	28,57	
7.1 7.1.32 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54,17		60,72	33,34	
7.1 7.1.32 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6	50	3	50	25	
7.1 7.1.32 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	6	50	3	50	25	
7.1 7.1.32 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64,28		25	7,14	
7.1 7.1.32 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	Unit	2	28,57	1	50	14,29	
7.1 7.1.32 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	100	0	0	0	
7.1 7.1.32 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselenggarakan				19,44		23,81	13,89	
7.1 7.1.32 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				0		0	0	
7.1 7.1.32 2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4	Kegiatan	0	0	0	0	0	
7.1 7.1.32 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				0		0	0	
7.1 7.1.32 2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan terpadu di Kecamatan	1	Laporan	0	0	0	0	0	
7.1 7.1.32 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelaaan Umum				58,33		71,43	41,67	
7.1 7.1.32 2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dn/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	12	Dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.32 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diberdayakan				50,00		50,00	25	
7.1 7.1.32 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50		50	25	
7.1 7.1.32 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	2	50	1	50	25	
7.1 7.1.32 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7.1 7.1.32 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0		0		0			

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
7.1.33	KECAMATAN PRABUMULIH UTARA								-	
7.1 7.1.33 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP				49,72		-	0	
7.1 7.1.33 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah				54,16		0	0	
7.1 7.1.33 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	480	Orang/Bulan	280	58,33	0	0	0	,,,,,,
7.1 7.1.33 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	6	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				51,04		0	0	
7.1 7.1.33 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Paket	4	66,67	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	13	paket	6	46,15	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1600	Paket	800	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	paket	12	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	24	Dokumen	12	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan / material yang disediakan	27	paket	12	44,44	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	6	50	0	0	0	, Belum mengisi realisasi, ,,,,,
7.1 7.1.33 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah				50		0	0	
7.1 7.1.33 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	unit	2	50	0	0	0	,,,,,,
7.1 7.1.33 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				50		0	0	
7.1 7.1.33 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	6	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	6	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	6	50	0	0	0	,,,,,,
7.1 7.1.33 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah				43,33		0	0	
7.1 7.1.33 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	10	Unit	4	40	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	4	40	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	8	unit	4	50	0	0	0	Belum mengisi realisasi,
7.1 7.1.33 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselenggarakan				66,67		-	0	
7.1 7.1.33 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan				100		0	0	
7.1 7.1.33 2 2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.	8	Laporan	8	100	0	0	0	,,,,,,
7.1 7.1.33 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan				50		0	0	
7.1 7.1.33 2 2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	12	Dokumen	6	50	0	0	0	,,,,, Belum mengisi realisasi, ,
7.1 7.1.33 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum				50		0	0	
7.1 7.1.33 2 2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	12	Dokumen	6	50	0	0	0	,,,,,,
7.1 7.1.33 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diberdayakan				25,00		-	0	
7.1 7.1.33 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				50		0	0	
7.1 7.1.33 3 2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	Laporan	2	50	0	0	0	,,,,,,
7.1 7.1.33 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				0		0	0	
7.1 7.1.33 3 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan Yang Terbangun	7	Unit	0	0	0		0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN 10=8/4*100	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100		
7.1.34	KECAMATAN CAMBAI								33,68	
7.1 7.1.34 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota				74,49		52,58	32,39	
7.1 7.1.34 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah				58,16		92,85	54	
7.1 7.1.34 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	700	orang/bulan	406	58	406	100	58	*****
7.1 7.1.34 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	dokumen	7	58,33	6	85,71	50	****, Capaian kinerja masih rendah, ,
7.1 7.1.34 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				58,33		85,71	50	
7.1 7.1.34 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	laporan	7	58,33	6	85,71	50	****, Capaian kinerja masih sangat rendah, ,
7.1 7.1.34 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				100		0	0	
7.1 7.1.34 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100	paket	100	100	0	0	0	*****
7.1 7.1.34 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				79,11		38,39	25	
7.1 7.1.34 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	paket	7	58,33	6	85,71	50	
7.1 7.1.34 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	paket	8	100	0	0	0	Capaian kinerja masih rendah,
7.1 7.1.34 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24	paket	24	100	12	50	50	*****
7.1 7.1.34 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	750	paket	434	57,87	0	0	0	*****
7.1 7.1.34 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30	paket	30	100	0	0	0	****, Capaian kinerja rendah, ,
7.1 7.1.34 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	480	eksemplar	280	58,33	240	85,71	50	*****
7.1 7.1.34 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	25	paket	25	100	0	0	0	****, Capaian kinerja rendah, ,
7.1 7.1.34 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	7	58,33	6	85,71	50	****, Capaian kinerja sangat rendah, ,
7.1 7.1.34 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				58,33		85,71	50	
7.1 7.1.34 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	7	58,33	6	85,71	50	*****
7.1 7.1.34 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	laporan	7	58,33	6	85,71	50	*****
7.1 7.1.34 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	laporan	7	58,33	6	85,71	50	*****
7.1 7.1.34 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya upah petugas keamanan kantor dan petugas kebersihan Kantor Kecamatan Cambai Kota Prabumulih	12	bulan	7	58,33	6	85,71	50	****, Capaian kinerja rendah, ,
7.1 7.1.34 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100		12,5	12,5	
7.1 7.1.34 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	unit	8	100	2	25	25	*****
7.1 7.1.34 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	1	100	0	0	0	*****
7.1 7.1.34 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselenggarakan				72,22		69,05	47,22	
7.1 7.1.34 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				100		50	50	
7.1 7.1.34 2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4	dokumen	4	100	2	50	50	*****
7.1 7.1.34 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di				58,33		71,43	41,67	
7.1 7.1.34 2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	12	dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
7.1 7.1.34 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terlaksananya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum				58,33		85,71	50	
7.1 7.1.34 2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana	12	dokumen	7	58,33	6	85,71	50	****, Capaian kinerja rendah, ,
7.1 7.1.34 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diberdayakan				75,00		50,00	25	
7.1 7.1.34 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan				50		100	50	
7.1 7.1.34 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	laporan	2	50	2	100	50	*****
7.1 7.1.34 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun				100		0	0	
7.1 7.1.34 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4	Laporan	4	100	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
7.1.35	KECAMATAN PRABUMULIH BARAT								36,01	
7.1 7.1.35 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				59,82		56,54	32,59	
7.1 7.1.35 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				61,31		69,05	42,26	
7.1 7.1.35 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	476	Orang/bulan	306	64,29	204	66,67	42,86	*****
7.1 7.1.35 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
7.1 7.1.35 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				58,33		71,43	41,67	
7.1 7.1.35 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
7.1 7.1.35 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100		0	0	
7.1 7.1.35 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100	0	0	0	
7.1 7.1.35 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				67,26		60,34	37,2	
7.1 7.1.35 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.35 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	6	100	0	0	0	*****
7.1 7.1.35 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	3	75	2	66,67	50	*****
7.1 7.1.35 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
7.1 7.1.35 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	7	58,33	5	71,43	41,67	Realisasi masih rendah, ,
7.1 7.1.35 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	16	Paket	10	62,5	7	70	43,75	*****
7.1 7.1.35 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	Capaian kinerja masih sangat rendah,
7.1 7.1.35 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58,33		57,14	33,34	
7.1 7.1.35 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
7.1 7.1.35 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	7	58,33	0	0	0	
7.1 7.1.35 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	
7.1 7.1.35 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	7	58,33	5	71,43	41,67	*****
7.1 7.1.35 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16,66		50	16,66	
7.1 7.1.35 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	3	33,33	3	100	33,33	*****
7.1 7.1.35 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0		0	*****
7.1 7.1.35 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselenggarakan				72,22		100,00	72,22	
7.1 7.1.35 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100		100	100	
7.1 7.1.35 2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1	100	1	100	100	*****
7.1 7.1.35 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di				58,33		100	58,33	
7.1 7.1.35 2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12	Dokumen	7	58,33	7	100	58,33	*****
7.1 7.1.35 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				58,33		100	58,33	
7.1 7.1.35 2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12	Dokumen	7	58,33	7	100	58,33	*****
7.1 7.1.35 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diberdayakan				75,00		25,00	12,5	
7.1 7.1.35 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50		50	25	
7.1 7.1.35 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	2	50	1	50	25	, Capaian kinerja masih rendah, , , , , ,
7.1 7.1.35 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100		0	0	
7.1 7.1.35 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	6	100	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI		REALISASI SD. BULAN JULI		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
7.1.36	KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR								1,86	
7.1 7.1.36 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PersentasePenunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				54,50		3,70	2,38	
7.1 7.1.36 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah				57,15		33,34	21,43	
7.1 7.1.36 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanannta Gaji dan Tunjangan ASN	980	Orang/Bulan	630	64,29	420	66,67	42,86	*****
7.1 7.1.36 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanannya Penatausahaan dan Penguji / verivikasi Keuangan	4	Laporan	2	50	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Apatur				50		0	0	
7.1 7.1.36 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	2	50	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatkannya Disiplin Aparatur				0		0	0	
7.1 7.1.36 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	Buah	0	0	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminitrasi Umum Perkantoran				58,33		0	0	
7.1 7.1.36 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediaanya peralatan dan perlengkapan Kantor	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia Paket Bahan Logistik Kantor	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak Dan Penggandaan	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12	12	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Paket	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58,33		0	0	
7.1 7.1.36 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12	Laporan	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12	Laporan	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				58,33		0	0	
7.1 7.1.36 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	12	12 Laporan	7	58,33	0	0	0	
7.1 7.1.36 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12	Laporan	7	58,33	0	0	0	
7.1 7.1.36 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselenggarakan				50,00		-	0	
7.1 7.1.36 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				50		0	0	
7.1 7.1.36 2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Dan instansi vertikal Terkait	4	Laporan	2	50	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				50		0	0	
7.1 7.1.36 2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di kecamatan	4	Laporan	2	50	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				50		0	0	
7.1 7.1.36 2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah Dan / instansi Vertikal terkait dalam pemeliharaan Sarana dan prasarana pelayanan	4	Laporan	2	50	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diberdayakan				54,16		-	0	
7.1 7.1.36 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa				58,33		0	0	
7.1 7.1.36 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	12	Laporan	7	58,33	0	0	0	*****
7.1 7.1.36 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					50		0	0	
7.1 7.1.36 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4	Laporan	2	50	0	0	0	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN JULI VOL	% 7=6/4*100	REALISASI SD. BULAN JULI VOL	% 9=8/6*100	CAPAIAN 10=8/4*100	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
7.1.37	KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH								-	
7.1.7.1.37 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota				-		-	0	
7.1.7.1.37 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	0	0	0	0	Target dan realisasi keuangan belum diisi,
7.1.7.1.37 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0	0	0	Target dan realisasi keuangan belum diisi,
7.1.7.1.37 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0	0	0	Target dan realisasi keuangan belum diisi,
7.1.7.1.37 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1	Laporan	0	0	0	0	0	
7.1.7.1.37 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	0	
7.1.7.1.37 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan tunjangan ASN	18	Orang	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	0	0	0	0	0	
7.1.7.1.37 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	84	Paket	0	0	0	0	0	Target dan realisasi keuangan belum diisi,
7.1.7.1.37 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Paket	0	0	0	0	0	Target dan realisasi keuangan belum diisi,
7.1.7.1.37 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Paket	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan,
7.1.7.1.37 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Paket	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan dan realisasi masih sangat rendah, ,
7.1.7.1.37 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Pengadaan	12	Paket	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan dan realisasi masih sangat rendah, ,
7.1.7.1.37 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Dokumen	0	0	0	0	0	,,,,,,
7.1.7.1.37 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12	Paket	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	0	0	0	0	, Belum mengisi target keuangan dan realisasi masih sangat rendah, ,,,,,,
7.1.7.1.37 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	0	0	0	, Target dan realisasi keuangan belum diisi, -, -,-,-,-,
7.1.7.1.37 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Laporan	0	0	0	0	0	, Belum mengisi target keuangan, ,,,,,,
7.1.7.1.37 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0	0	
7.1.7.1.37 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0		0			Belum mengisi target dan realisasi keuangan,
7.1.7.1.37 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan				-		-	0	
7.1.7.1.37 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan				0		0	0	
7.1.7.1.37 2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	0	0	0	0	0	,,,,,,
7.1.7.1.37 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				0		0	0	
7.1.7.1.37 2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	0	0	0	0	0	
7.1.7.1.37 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				0		0	0	
7.1.7.1.37 2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	Dokumen	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan,
7.1.7.1.37 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-		-	0	
7.1.7.1.37 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaab Desa				0		0	0	
7.1.7.1.37 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	0	0	0	0	0	Belum mengisi target keuangan, ,
7.1.7.1.37 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7.1.7.1.37 3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0		0		0			

Tabel 2. 3 REKAPITULASI EVALUASI KERJA KINERJA OPD KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 S/D BULAN APRIL

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KINERJA
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	225.015.303.383	9,61	16,84
2	DINAS KESEHATAN	103.986.936.528	13,63	11,48
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	106.160.790.144	19,93	16,95
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	59.805.600.000	9,72	36,28
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41.070.900.000	6,01	11,19
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.506.982.654	9,98	54,7
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	6.392.004.314	16,55	35,35
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.018.893.849	31,39	0
9	DINAS SOSIAL	13.266.650.500	11,64	15,49
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.869.354.344	12,13	1,3
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.823.900.209	47,65	37,66
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.050.115.937	44,19	36,1
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.033.229.901	32,18	38,96
14	DINAS PERHUBUNGAN	6.060.390.395	23,39	28,56
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.340.338.922	22,3	16,7
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.974.524.174	28,09	20,25
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.336.176.868	30,02	18,89
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.401.919.554	32,53	0
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.280.238.821	23,56	30,58
20	DINAS TENAGA KERJA	5.643.557.266	22,09	21,51
21	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.985.894.799	38,39	9,88
22	DINAS PERIKANAN	2.154.360.039	29,01	37,5
23	DINAS PERTANIAN	8.114.868.665	38,15	40,34
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.336.482.574	21,81	13,35
25	SEKRETARIAT DAERAH	130.043.200.000	19,26	19,37
26	SEKRETARIAT DPRD	66.614.859.000	15,53	76,57
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.045.749.695	37,61	4,96
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	110.604.146.873	10,41	17,44
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.098.771.393	19,57	15,89
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	37.039.897.592	23,82	21,95
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.163.243.277	20,44	0
32	INSPEKTORAT DAERAH	11.014.906.940	49,04	18,03
33	KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN	4.366.353.764	43,73	28,23
34	KECAMATAN PRABUMULIH UTARA	6.438.624.003	25,15	0
35	KECAMATAN CAMBAI	5.300.294.631	25,5	33,68
36	KECAMATAN PRABUMULIH BARAT	6.181.636.573	46,19	36,01
37	KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR	13.111.475.934	37,12	1,86
38	KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH	1.993.019.254	28,36	0

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 dan realisasi tahun kedua RPD 2024-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2025, secara umum dapat dilihat pada tabel diatas.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

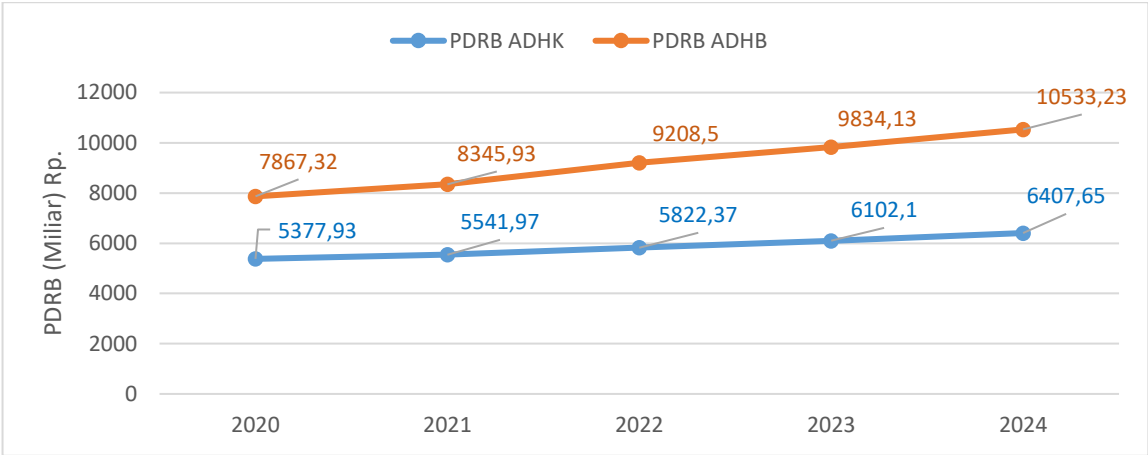
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Prabumulih pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Prabumulih yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Prabumulih tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Prabumulih pada tahun 2024 yaitu sebesar 6.407,65 milyar rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,01% atau meningkat sebesar 305,81 milyar rupiah dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Prabumulih

Sedikit berbeda dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih tahun 2020-2024 selalu menunjukkan peningkatan. PDRB ADHB Kota Prabumulih tahun 2020-2024 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	479,55	517,31	546,47	562,90	619,50
2	Pertambangan dan Penggalian	768,46	818,22	883,62	835,15	863,26
3	Industri Pengolahan	830,55	879.17	964,48	1.052,85	1.142,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,52	17,57	18,46	20,09	21,67
5	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	3,10	3,15	3,34	3,34	3,58
6	Konstruksi	1.369,42	1.464,09	1.609,40	1.713,38	1.803,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.909,63	2.062,26	2.366,92	2.629,25	2.859,76
8	Transoportasi dan Pergudangan	221,50	226,55	261,75	296,58	288,54
9	Penyediaan. Akomondasi dan Makan-Minum	307,09	327,57	377,60	417,35	447,91
10	Informasi dan Komunikasi	91,74	99,91	108,62	119,76	135,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	365,20	379,11	399,37	418,11	440,60
12	Real Estate	638,80	656,57	709,36	752,87	798,63
13	Jasa Perusahaan	63,51	65,23	72,02	78,62	84,61
14	Administrasi Pemerintahan . Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	295,99	308,32	322,46	336,15	360,66
15	Jasa Pendidikan	233,49	239,16	259,58	278,50	310,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	230,89	238,30	257,23	266,12	294,92
17	Jasa Lainnya	41,90	43,45	47,81	53,11	57,99
PDRB		7.867,32	8.345,93	9.208,50	9.834,13	10.533,23

Sumber : BPS Kota Prabumulih

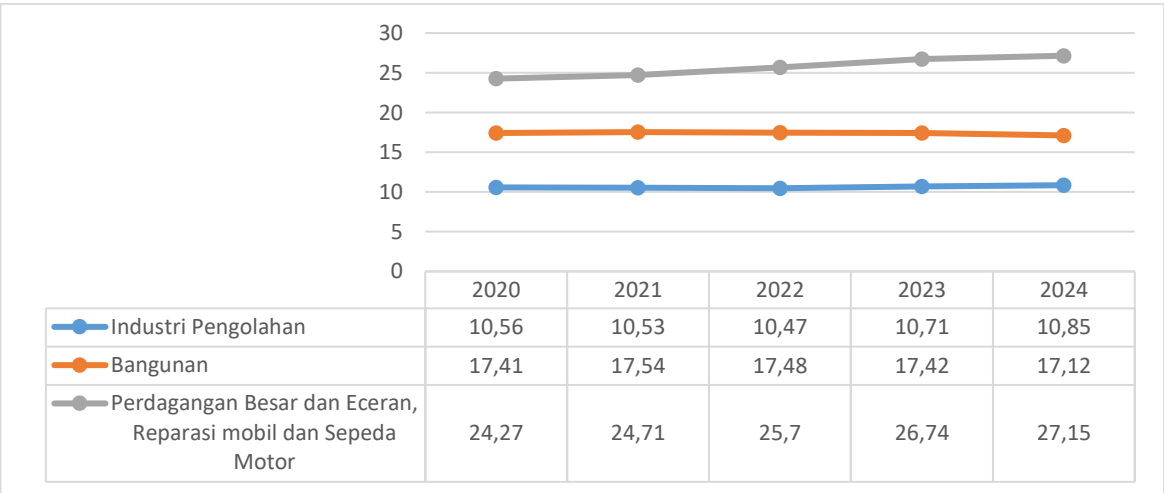
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Prabumulih tahun 2020-2024 didominasi oleh tiga sektor, yaitu: (a) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor; (b) Bangunan; dan (c) Industri Pengolahan, dengan nilai kontribusi masing-

masing sektor lebih dari 10 persen. Ketiga sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Selanjutnya kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB terhadap total PDRB ADHB Kota Prabumulih tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Prabumulih (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,10	6,20	5,93	5,72	5,88
2	Pertambangan dan Penggalian	9,77	9,80	9,60	8,49	8,20
3	Industri Pengolahan	10,56	10,53	10,47	10,71	10,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
6	Bangunan	17,41	17,54	17,48	17,42	17,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	24,27	24,71	25,70	26,74	27,15
8	Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,71	2,84	3,02	2,74
9	Penyediaan, Akomodasi dan Makan-Minum	3,90	3,92	4,10	4,24	4,25
10	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,20	1,18	1,22	1,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,64	4,54	4,34	4,25	4,18
12	Real Estate	8,12	7,87	7,71	7,66	7,58
13	Jasa Perusahaan	0,81	0,78	0,78	0,80	0,80
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	3,76	3,69	3,50	3,42	3,42
15	Jasa Pendidikan	2,97	2,87	2,82	2,83	2,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,93,	2,86	2,79	2,71	2,80
17	Jasa Lainnya	0,53	0,52	0,52	0,54	0,55
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

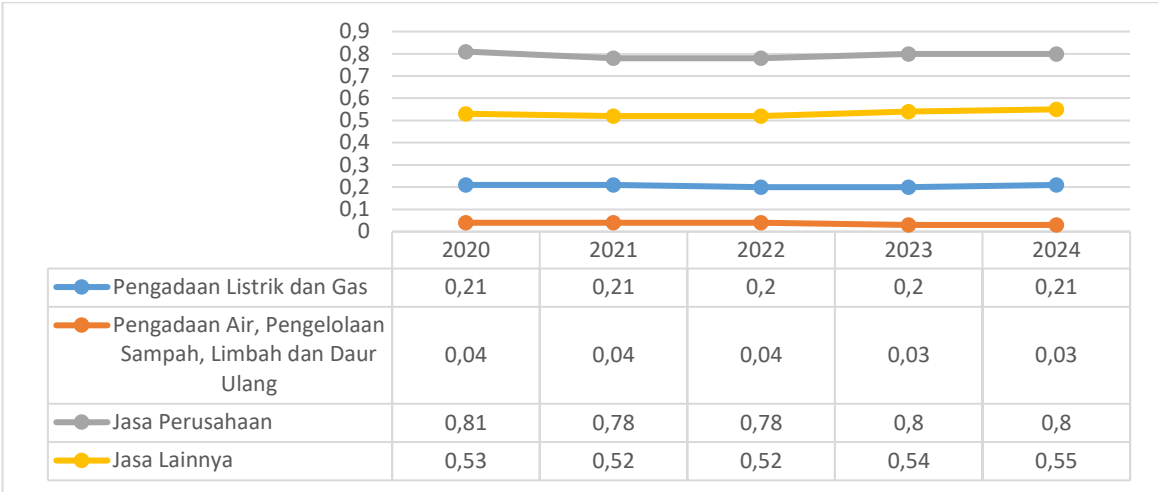
Sumber : Buku PDRB -BPS Prabumulih



Gambar 3.2 Tiga Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Prabumulih

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2020-2024, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (b) Pengadaan Listrik dan Gas; (c) Jasa Lainnya; dan (d) Jasa Keuangan; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor 0-1 persen.



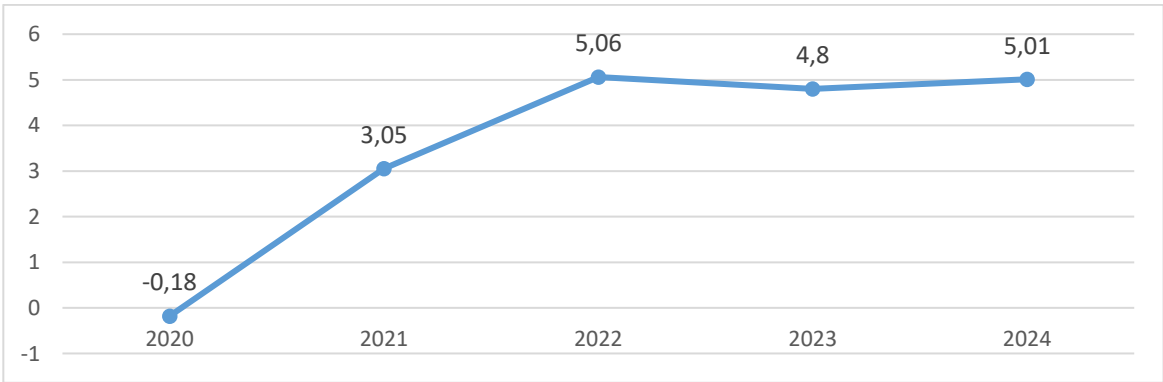
Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Prabumulih

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

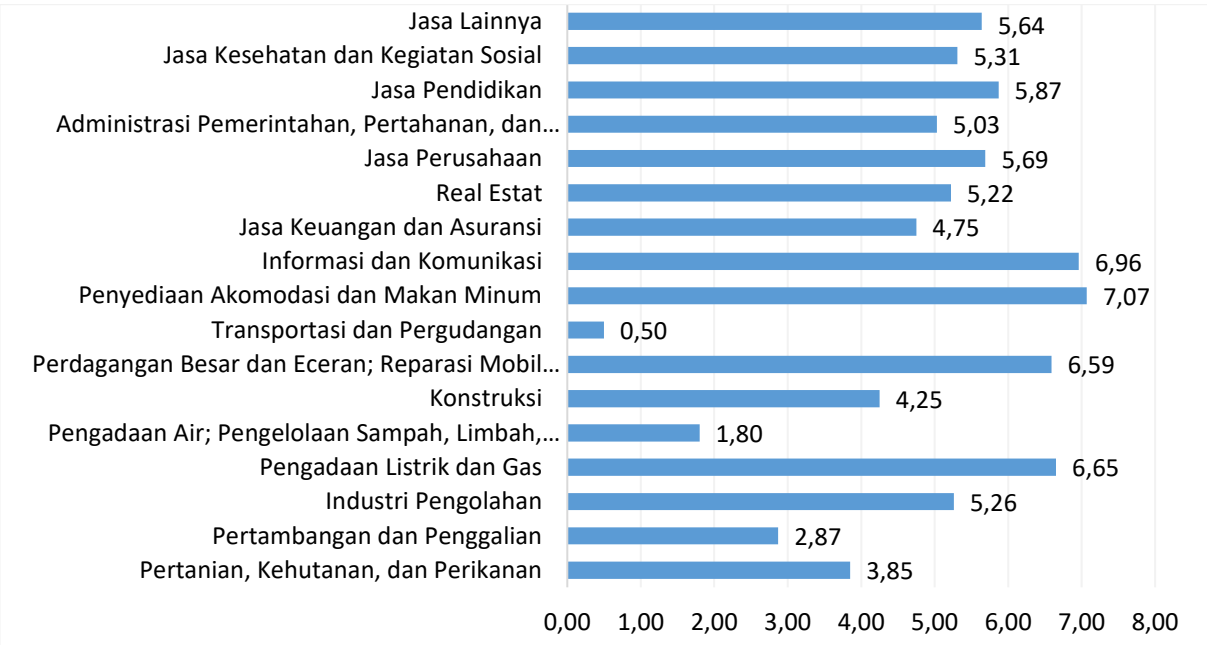
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih pada tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2020, LPE Kota Prabumulih sebesar -0,18 persen, walaupun terjadi kontraksi yang sangat signifikan pada tahun 2020 imbas pandemi covid-19 namun hingga tahun 2024 LPE Kota Prabumulih menunjukkan kecenderungan meningkat kembali menjadi 5,01 persen tahun 2024.



Gambar 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

Pada tahun 2024, sektor dalam PDRB yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu sebesar 7,07 persen, kemudian diurutan kedua yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 6,96 persen. Karakter Kota Prabumulih sebagai Kota perlintasan antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan menjadikan dua sektor usaha ini cukup berkembang di kota ini, namun terdapat satu sektor usaha yang mengalami kontraksi di tahun 2024, yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,50 persen. Pertumbuhan ekonomi per sektor usaha Kota Prabumulih tahun 2024 ditunjukkan dalam gambar berikut.



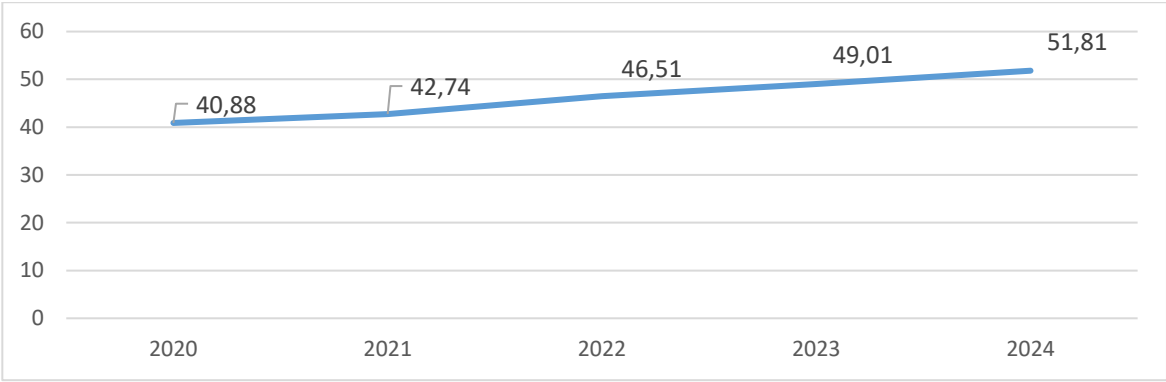
Gambar 3. 5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2024

Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

3.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Prabumulih tahun 2020-2024 terus meningkat. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB sebesar 7.791,1 milyar rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 188.665 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 40,88 juta rupiah/jiwa. Nilai ini terus meningkat hingga sebesar 51,81 juta rupiah/jiwa pada tahun 2024.



Gambar 3. 6 PDRB ADHB Per Kapita Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 (juta Rp)

Sumber: Buku PDRB Kota Prabumulih

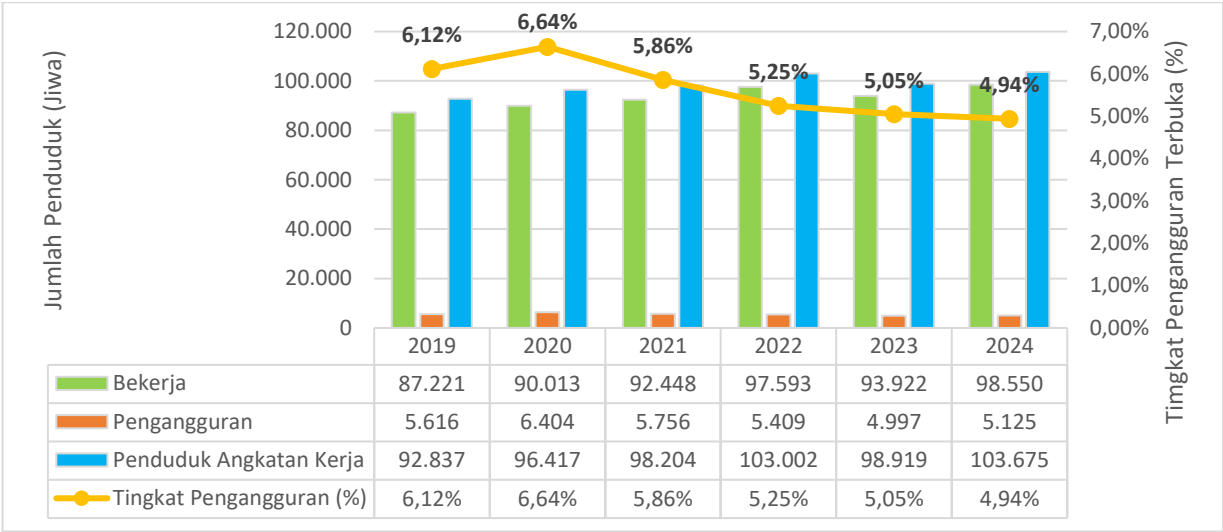
3.1.4 Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Prabumulih tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, TPT Kota Prabumulih sebesar 6,64 persen. Perbaikan perekonomian pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 5,25 persen pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 4,94 persen pada tahun 2024.

Dari tahun 2020 ke 2022 terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Prabumulih, namun di tahun 2023 terjadi penurunan. Dari 97.593 orang yang bekerja pada tahun 2022 menjadi 93.922 orang yang bekerja pada tahun 2023 atau terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja sebesar 3.671 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi pengurangan sebesar 4.083 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 412 orang.

Pada tahun 2022, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 92.448 orang pada tahun 2021 menjadi 97.593 orang pada tahun 2022 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 5.145 orang. Di sisi lain, terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 4.798 orang atau sebesar 4,88 persen, sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 347 orang. Tingginya penambahan jumlah orang yang bekerja dibandingkan penambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 11,62 persen, yaitu dari 5,86 persen pada tahun 2021 menjadi 5,25 persen pada tahun 2022.

Namun berbeda untuk di tahun 2024, penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,11% dari 5,05% menjadi 4,94% disebabkan karena naiknya angkatan kerja dari 98.919 orang menjadi 103.675 orang atau sebesar 4.756 orang, kondisi ini diikuti juga naiknya jumlah orang yang bekerja sebesar 4.628 orang.



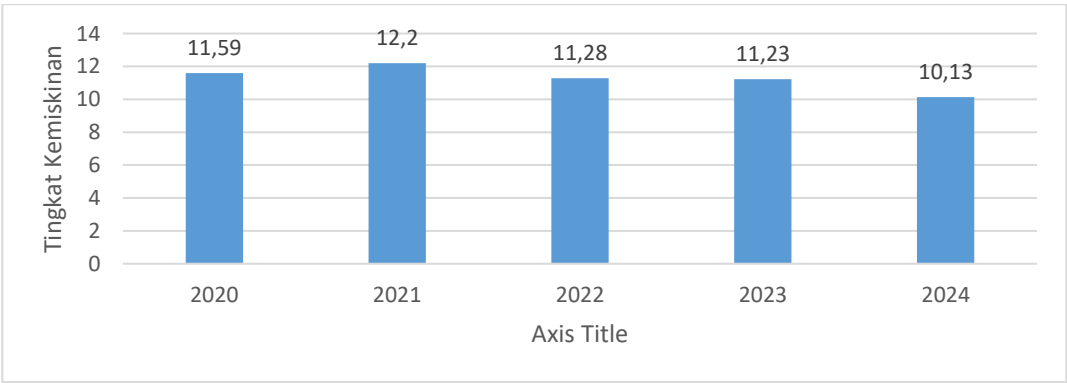
Gambar 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Prabumulih

Penurunan pengangguran melalui peningkatan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Prabumulih. Selain itu dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif.

3.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin.



Gambar 3. 8 Tingkat Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

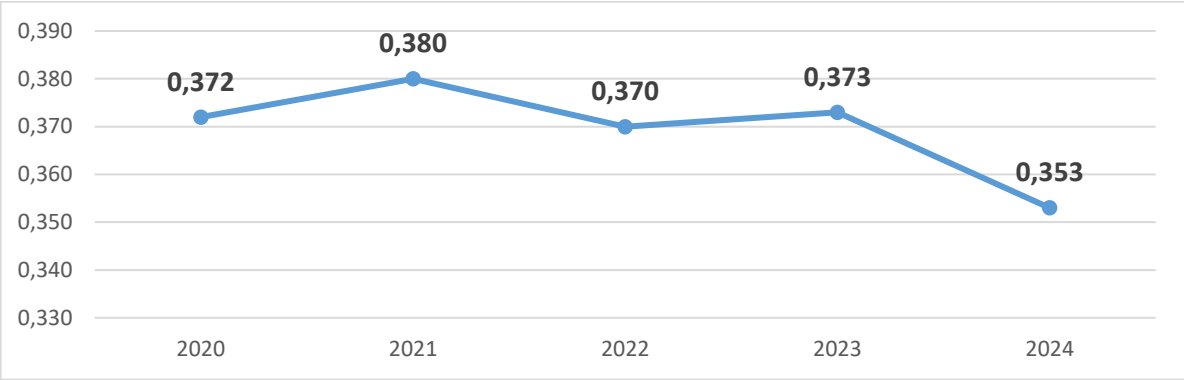
Sumber : BPS Kota Prabumulih

Angka kemiskinan Kota Prabumulih tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 11,23 persen menjadi 10,13 persen, penurunan ini diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun dari pihak swasta.

3.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini. Ketimpangan pendapatan dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran riil per kapita. Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Indeks gini Kota Prabumulih pada tahun 2020 sebesar 0,344, kemudian meningkat menjadi 0,372 pada tahun 2020. Meningkatnya indeks gini menunjukkan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah belum merata dirasakan oleh masyarakat Kota Prabumulih. Angka ini tetap bertahan hingga tahun 2023.

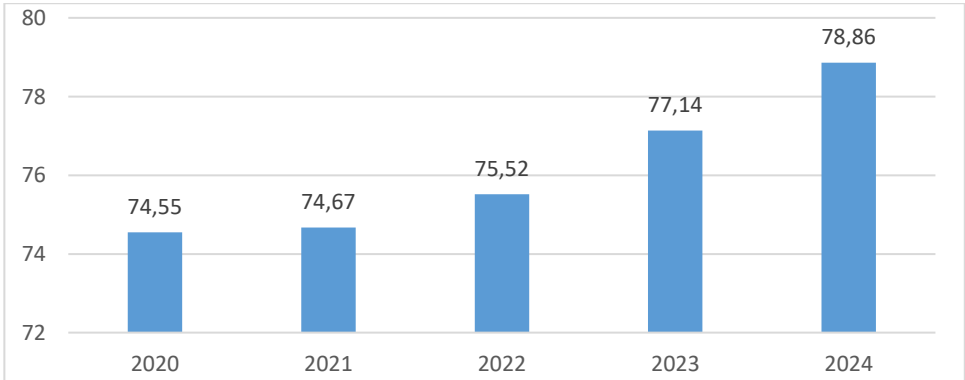


Gambar 3. 9 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS-Kota Prabumulih

3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Prabumulih

Secara umum, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Prabumulih dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,72% per tahun. Pada tahun 2020 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Prabumulih sebesar 74,55, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 78,86 pada tahun 2024. Adanya pandemi *covid-19* di tahun 2020, salah satu komponen pendukung IPM yaitu ‘Pengeluaran” menurun dari tahun sebelumnya, namun kondisi tidak menyebabkan nilai IPM juga menurun.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah pada mulanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, terdapat pergantian dasar hukum pelaksanaan kebijakan keuangan daerah, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan keuangan daerah di Kota Prabumulih sampai dengan tahun 2021 masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tabel 3. 3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Prabumulih Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	PENDAPATAN DAERAH	1.004.882.518.352	1.108.984.326.511	1.197.851.689.058	1.072.636.419.816	1.106.027.664.300	33.391.244.484
01.01	Pendapatan Asli Daerah	101.593.166.773	120.616.191.129	30.745.181.958	170.815.712.403	166.815.712.403	(4.000.000.000)
A	Pajak daerah	35.535.542.734	42.619.605.076	40.696.468.326	78.612.712.403	78.612.712.403	
B	Retribusi daerah	2.662.166.936	2.549.473.205	2.327.155.212	7.756.000.000	7.756.000.000	
C	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2.975.144.375	5.152.489.519	3.431.153.149	3.837.000.000	3.837.000.000	
D	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	60.420.312.728	70.294.623.328	84.290.405.270	80.610.000.000	76.610.000.000	(4.000.000.000)
01.02	Pendapatan Transfer	965.882.728.111	988.368.135.382	1.067.106.507.100	901.820.707.413	939.211.951.897	37.391.244.484
A	Transfer Pemerintah Pusat	854.686.260.716	863.547.132.782	922.472.570.304	847.722.539.816	865.286.295.000	17.563.755.184

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
B	Transfer Antar-Daerah	11.196.467.395	124.821.002.600	144.633.936.796	54.098.167.597	73.925.656.897	19.827.489.300
01.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.576.291.000					
A	Hibah	16.576.291.000					
B	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	-					

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih Tahun 2024

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:

- 1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- 3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- 4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Prabumulih Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2	BELANJA DAERAH	994.230.665.915	1.077.610.257.595	1.192.755.047.144	1.172.636.419.816	1.343.203.586.961	
02.01	Belanja Operasi	792.083.420.550	807.362.098.158	898.693.350.067	67.773.449.464		
02.01.01	Belanja Pegawai	454.864.617.569	458.313.784.463	543.237.553.227			
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	320.310.013.037	321.530.318.359	314.314.436.064			
02.01.03	Belanja Bunga						
02.01.04	Belanja Subsidi			864.037.500			
02.01.05	Belanja Hibah	13.792.169.944	27.148.515.336	40.018.603.277			
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.116.620.000	369.480.000	258.720.000			
02.02	Belanja Modal	168.233.155.773	233.487.862.056	251.051.778.496	126.038.267.352		
02.03	Belanja Tidak Terduga	1.189.695.212	760.345.000	917.830.200	7.280.000.000		

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
02.04	Belanja Transfer	34.769.666.466	35.999.952.380	42.092.088.380	71.544.703.000		
02.04.01	Belanja Bagi Hasil						
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	34.769.666.466	35.999.952.380	42.092.088.380			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih Tahun 2022, 2023, dan 2024; APBD Kota Prabumulih Tahun 2025;

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2025)		
		2022	2023	2024	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3	PEMBIAYAAN	145.952.735.340	180.883.397.999	183.374.044.407	100.000.000.000	188.293.458.480	88.293.458.480
03.01	Penerimaan Pembiayaan	147.952.735.340	183.406.318.944	183.374.044.407	100.000.000.000	188.293.458.480	88.293.458.480
03.01.01	SILPA	147.952.735.340	183.406.318.944	183.374.044.407	100.000.000.000	188.293.458.480	88.293.458.480
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.522.920.945	183.374.044.407			
03.02.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;						
03.02.02	Penyertaan modal daerah	2.000.000.000	2.522.920.945	-	-	-	-
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kota Prabumulih 2005-2045. Visi Kota Prabumulih tersebut adalah: “Prabumulih yang Sejahtera dan Mandiri”. Adapun hubungannya tujuan dan sasaran Kota Prabumulih dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan	Sasaran
Terciptanya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang Merata	1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri 2. Meningkatnya Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan 3. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan 4. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 5. Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM
Terwujudnya Masyarakat Prabumulih yang Sejahtera	1. Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial 2. Meningkatnya Kesenjangan Gender 3. Menurunnya Angka Pengangguran 4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas	1. Menurunnya Kawasan Kumuh 2. Meningkatnya RT yang memiliki akses air minum 3. Meningkatnya RT yang memiliki akses sanitasi 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kota Prabumulih

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kota Prabumulih dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Prabumulih

No	Indikator	Target Tahun 2025		
		Nasional	Sumatera Selatan	Prabumulih
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,40	5,30
2	Tingkat Kemiskinan(%)	7,0 – 8,0	9,37-10,37	10
3	Tingkat PengangguranTerbuka (%)	4,5 – 5,0	3,82-3,93	4,85
4	Indeks Gini	0,378 – 0,382	0,316-0,320	0,350
5	Indeks Modal Manusia /IndeksPembangunan Manusia	0,56	75,61 – 76,61	79,05
6	Pendapatan per Kapita (juta Rp)		83,40	54,03
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	68,19	63
8	Penurunan Emisi GRK Tahunan (Ton Co2 Eq)	35,53	69,97	26.375,98 Ton Co2 Eq

Sumber : RKP Tahun 2025; Hasil Kesepakatan Target Indikator Makro dan Sasaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025

4.3 Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2025. Tema RKP untuk tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yaitu “**Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan**”.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah: “**Peningkatan Pelayanan Publik dan Infrastruktur Dasar yang Merata**”.

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2025 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) Asta Cita Presiden, sebagai berikut:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan struktur sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial, dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam rangka mendukung 8 (delapan) Asta Cita presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau, Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan

- 14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya
- 15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam mewujudkan Keadilan Ekonomi
- 16. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
- 17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD tahun 2025 adalah:

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan;
- 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Pembangunan Kota Prabumulih merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPD 2024-2026, dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kota Prabumulih.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kota Prabumulih untuk Tahun 2025 yaitu:

- 1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 2. Peningkatan Perekonomian Kerakyatan;
- 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
- 4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata.

Penyandingan Prioritas Kota Prabumulih terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Sandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah Kota Prabumulih

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kota
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3	Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5	Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kota
8	Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau, Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam mewujudkan Keadilan Ekonomi	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
16	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
17	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan

Penyandingan Prioritas Kota Prabumulih terhadap Prioritas Provinsi Sumatera Selatan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Sandingan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Prioritas Daerah Kota Prabumulih

No	Prioritas Sumsel	Prioritas Kota
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan
3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
4	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Prabumulih yang dikelompokkan berdasarkan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sandingan Prioritas dan Sasaran Kota Prabumulih

No	Prioritas Kota	Sasaran Daerah
1	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Peningkatan Perekonomian Kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri
		Meningkatnya Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan
		Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan
		Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu dan Merata	Menurunnya Kawasan Kumuh
		Meningkatnya RT yang memiliki akses air minum
		Meningkatnya RT yang memiliki akses sanitasi
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

4.5 Sasaran Pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025

Target sasaran pembangunan Kota Prabumulih pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4. 6 Sasaran dan Targetnya Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target	
			RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,95%	4,95%
2	Meningkatnya Nilai Tambah penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,14%	7,14%
3	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, dan Perikanan	3,98%	3,98%
4	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Investasi	5%	5%
5	Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	4,9%	4,9%
6	Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial	75,9%	75,9%
7	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.87	93.87
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,63%	69,63%
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,72	0,72
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,75 Tahun	71,75 Tahun
11	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	37,36%	37,36%
12	Meningkatnya RT yang memiliki akses air minum	Persentase RT yang terlayani air minum	96,57%	96,57%
13	Meningkatnya RT yang memiliki akses sanitasi	Persentase RT yang memiliki akses sanitasi	94,76%	94,76%
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,47	69,47
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
16	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	BB (70-75)	BB (70-75)
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
		Level Maturitas	3,2	3,2
17	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN	40-45	40-45
		Indeks SPBE	3,0-3,1	3,0-3,1

Dalam pencapaian 17 sasaran tersebut, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi perangkat daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran.

4.5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri

Meningkatnya nilai tambah produksi industri di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.2 Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan

Meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Meningkatkan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.3 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan

Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian dan perikanan di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian dan Perikanan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	Memfasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian
		Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian	Dinas Pertanian
		Meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya	Dinas Perikanan
		Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Pertanian

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.4 Realisasi Penanaman Modal

Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.5 Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM

Meningkatnya perekonomian sektor UMKM di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.6 Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial

Meningkatnya kualitas bantuan sosial di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin	Dinas Sosial
		Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.7 Meningkatnya Kesenjangan Gender

Meningkatnya kesetaraan gender di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perempuan	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Perlindungan perempuan dan anak	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.8 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	Dinas Tenaga Kerja
		Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	
		Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.9 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Optimalisasi pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Optimalisasi pengembangan kurikulum	
		Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.10 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan budaya hidup sehat	
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	RSUD

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.11 Menurunnya Kawasan Kumuh

Menurunnya kawasan kumuh di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Kawasan Kumuh

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Membangun rumah layak huni untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan pemenuhan drainase ramah lingkungan	
		Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.12 Meningkatnya Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum

Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses air minum di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 18 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya RT Yang Memiliki Akses Air Minum

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses air minum	Meningkatkan akses air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.13 Meningkatnya Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi

Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 19 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya RT Yang Memiliki Akses Sanitasi

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi	Meningkatkan akses air sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan prasarana dan sarana utilitas umum	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara

bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 20 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	
		Meningkatkan penanganan sampah	
		Meningkatkan pengurangan sampah	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.15 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 21 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.16 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF) yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 22 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	
		Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan	
		Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi	
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

4.5.17 Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Prabumulih akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *Critical Succes Factor* (CSF)

yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4. 23 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
17	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	BKPSDM
		Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat	

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Prabumulih, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2025 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memuat di antaranya:

- 1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
 - 3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.
- Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Prabumulih Tahun 2025

No	Uraian	APBD Tahun Berjalan (2025)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	170.815.712.403	166.815.712.403	(4.000.000.000)
A	Pajak daerah	78.612.712.403	78.612.712.403	-
B	Retribusi daerah	7.756.000.000	7.756.000.000	-
C	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.837.000.000	3.837.000.000	-
D	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	80.610.000.000	76.610.000.000	(4.000.000.000)
1.2	Pendapatan Transfer	901.820.707.413	939.211.951.897	37.391.244.484
A	Transfer Pemerintah Pusat	847.722.539.816	865.286.295.000	17.563.755.184
B	Transfer Antar-Daerah	54.098.167.597	73.925.656.897	19.827.489.300
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		
A	Hibah			
B	Dana Darurat			
C	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	-		
	Jumlah Pendapatan	1.072.636.419.816	1.106.027.664.300	33.391.244.484
2	Belanja Daerah	1.172.636.419.816	1.343.203.586.961	170.567.167.145
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			

No	Uraian	APBD Tahun Berjalan (2025)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.4	Belanja Transfer			
2.4.1	Belanja Bagi Hasil			
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan			
3	Pembiayaan Daerah	0		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-		-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-		-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-		-
3.2.2	Penyertaan modal daerah	-		-
3.2.3	Pembentukan dana cadangan	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Prabumulih

Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALI KOTA PRABUMULIH

